

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, S

Edisi Juli | Tahun 2022 No. 36

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Saadiah Uluputty, S.T

Perempuan Kian Memadai Emban Misi Wakil Rakyat

Buka Bimteknas Aleg Perempuan, Presiden PKS Ajak Kader **Masifkan** Publikasi Kebaikan

KUTIPAN

Jakarta (22/06) -- Presiden PKS, Ahmad Syaikh, membuka secara resmi acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PKS se-Indonesia di Millennium Hotel, Jakarta, Rabu malam (22/06).

Dalam sambutannya, Syaikh mengajak kepada seluruh anggota legislatif perempuan PKS untuk lebih aktif dalam mempublikasi kerja-kerja yang telah dilakukan.

"Kita perlu memposting, mempublikasi hal-hal positif, kebaikan-kebaikan, dan kinerja real yang telah kita lakukan kepada masyarakat", ungkap Syaikh.

Menurutnya, hal itu sangat penting untuk dilakukan karena masih minimnya pengetahuan publik atas kinerja anggota legislatif PKS.

"Terang terang, saya sangat hormat kepada kinerja



dari ibu-ibu sekalian. Bagaimana para aleg perempuan PKS totalitas untuk mengadvokasi aspirasi rakyat, sekaligus mengawal jalannya pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Sayangnya, perjuangan kita belum terpublish di masyarakat dengan baik", ujar lagi.

Oleh karenanya, Syaikh meminta aleg perempuan PKS untuk memperkuat pemahaman atas literasi digital dan pengelolaan media sosial. Selengkapnya di fraksi.pks.id



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

"Terang terang, saya sangat hormat kepada kinerja dari ibu-ibu sekalian. Bagaimana para aleg perempuan PKS totalitas untuk mengadvokasi aspirasi rakyat, sekaligus mengawal jalannya pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Sayangnya, perjuangan kita belum terpublish di masyarakat dengan baik"

Sekjen PKS Sampaikan Empat Hal yang Diperjuangkan oleh Aleg Perempuan PKS

KUTIPAN

Jakarta (23/06) – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Alhabsyi, menghadiri sekaligus memberikan materi dalam acara Bimteknas Aleg Perempuan PKS DPRD Se-Indonesia di Millennium Hotel, Jakarta, pada Kamis (23/06).

Dalam paparannya, pria yang kerap disapa Habib Aboe ini menyatakan bahwa agenda Bimteknas merupakan sebuah terobosan yang perlu dilanjutkan, sebab dalam kegiatan ini setiap peserta dapat saling berbagi cerita perjuangan, dan meningkatkan koneksi satu sama lain.

"Aleg perempuan PKS harus gesit dalam menyelesaikan tugas anggota dewan, sebab di dunia politik akan sering berhadapan dengan banyak tantangan. PKS saat ini memiliki 200 aleg perempuan seluruh Indonesia dan ini merupakan energi dan



formasi yang luar biasa, tentu kita harus optimis dalam melanjutkan perjuangan ini", ungkap Habib Aboe.

Dalam kesempatan ini, Habib Aboe menyebut bahwa ada empat tugas penting yang perlu diperjuangkan oleh anggota legislatif perempuan.

"Pertama, dalam bidang legislasi, para aleg perempuan bersatu memperjuangkan berbagai kepentingan perempuan dalam produk

legislasi. Misalkan, mengenai fasilitas cuti melahirkan. Kedua, para Aleg perempuan juga harus aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, jika terdapat suatu permasalahan langsung diadvokasi", ujarnya.

Lebih lanjut, Habib Aboe juga berpesan bahwa aleg perempuan perlu menumbuhkan-kembangkan peran perempuan dalam keluarga.

"Aleg tidak hanya mengadvokasi urusan publik saja, tetapi didorong untuk bisa menyejahterakan ekonomi keluarga", imbuhnya.

Terakhir, aleg perempuan juga harus mampu membangun basis sosialnya sendiri dengan membuat kegiatan atau gerakan produktif disertai semangat.

"Silahkan berinovasi dan membuat kegiatan yang kreatif dan dinamis di masyarakat", pungkas Anggota Komisi III DPR RI tersebut.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

"Aleg perempuan PKS harus gesit dalam menyelesaikan tugas anggota dewan, sebab di dunia politik akan sering berhadapan dengan banyak tantangan. PKS saat ini memiliki 200 aleg perempuan seluruh Indonesia dan ini merupakan energi dan formasi yang luar biasa, tentu kita harus optimis dalam melanjutkan perjuangan ini"



Gelar Konsolidasi Nasional, Aleg Perempuan PKS Siap All Out Melayani Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (23/06) — Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Anggota Legislatif perempuan se-Indonesia dengan Tema 'Strategi Transformasi, Kolaboratif dan Kontributif Aleg Perempuan PKS se-Indonesia' di Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Hadir dalam pembukaan acara Presiden PKS Ahmad Syaikh, Ketua Fraksi PKS DPR RI Juwaini, serta jajaran Pimpinan dan Anggota Fraksi PKS DPR RI. Acara dimeriahkan antara lain penampilan Sound of Garuda Keadilan dan artis cantik Fatin Sidiq Lubis.

Presiden PKS Ahmad Syaikh dalam sambutannya mengatakan PKS terus berkomitmen memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar caleg.

"Bukan hanya caleg, PKS berharap aleg perempuan PKS terus bertambah jumlahnya. Jika saat ini di pusat ada 9 orang dari 50 orang, ke depan akan terus ditingkatkan," ungkap Syaikh.



Demikian juga di daerah-daerah. PKS, kata Syaikh, terbuka untuk seluruh perempuan, apalagi perempuan dari generasi milenial, apapun latar belakang suku, agama, profesi dan organisasinya untuk menjadi caleg PKS.

Di samping jumlah, Syaikh menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kapasitas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat melalui produk legislasi dan advokasi kebijakan. Gunakan seluruh saluran komunikasi publik baik media massa maupun media sosial. Agar informasi perjuangan

an PKS semakin luas diketahui masyarakat.

"Aleg perempuan harus menjadi yang terdepan dan menjadi teladan dalam pelayanan kepada rakyat. Apalagi ada kebijakan yang hanya bisa efektif melalui suara kaum perempuan. Dan saya lihat kinerja aleg perempuan PKS luar biasa," ungkap Syaikh.

Sementara Ketua Fraksi PKS Juwaini mengatakan acara ini diselenggarakan untuk meningkatkan peran dan kapasitas aleg perempuan PKS dalam mengawal kebijakan negara yang pro rakyat, pro umat dan pro NKRI.

"Aleg perempuan PKS punya peran strategis di PKS. Sama sekali bukan pelengkap. Ada yang menjadi pimpinan fraksi, pimpinan komisi, bahkan pimpinan dewan. Kita ingin aleg perempuan PKS makin meningkat peran dan kapasitasnya dalam membela dan melayani rakyat Indonesia sehingga bersama-sama PKS all out melayani Indonesia," ungkap Juwaini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Sesuai amanat Ketua Majelis Syura Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, PKS ini milik bangsa. Siapapun warga negara Indonesia, apapun latar suku, agama, dan budayanya silakan bergabung dengan PKS dan gunakan partai ini untuk membangun bangsa. Dan, aleg perempuan punya peran besar untuk merealisasikan pesan kolaborasi PKS tersebut"

Fraksi PKS **Dorong** **Aturan** Pro Ibu dan Anak, Dukung Cuti Hamil 6 Bulan

KUTIPAN

Jakarta (23/06) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa Fraksi PKS berkomitmen untuk mendukung peraturan yang berpihak pada perempuan, khususnya kaum ibu dan anak.

"Fraksi PKS sejak awal mendorong produk legislasi yang melindungi ibu dan anak. Termasuk juga yang terbaru, seperti cuti hamil dan cuti melahirkan, PKS sangat setuju dan mendukung penuh", ungkap Jazuli saat membuka agenda Bimteknas Aleg Perempuan PKS se-Indonesia di Millennium Hotel, Jakarta, Rabu malam (22/06). Adapun, lanjut Jazuli, PKS sejak awal telah memberikan ruang bagi perempuan untuk terjun di ranah politik.

"Kami, di PKS, senantiasa memenuhi kuota 30% pencalonan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan. Bahkan, persentasenya selalu lebih tinggi dari 30%, tidak pernah sekadar ngepas", ucapnya.

Menurut Jazuli, keberadaan

anggota legislatif perempuan sangat penting bagi terciptanya aturan ramah bagi perempuan.

"Bagaimanapun, kami, anggota DPR yang laki-laki, tidak bisa memahami dan mengetahui sepenuhnya soal apa saja yang menjadi kebutuhan perempuan. Kehadiran anggota legislatif perempuanlah yang diharapkan bisa memberi warna baru bagi ruang politik kita", ujarnya lagi.

Oleh karenanya, Jazuli mengajak aleg perempuan PKS yang saat ini berkpiarah di DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk lebih proaktif mendorong kebijakan terbaik bagi perempuan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Fraksi PKS sejak awal mendorong produk legislasi yang melindungi ibu dan anak. Termasuk juga yang terbaru, seperti cuti hamil dan cuti melahirkan, PKS sangat setuju dan mendukung penuh”,

Bimtek Perempuan PKS, Saadiah: Perempuan **Kian** **Memadai** dalam Mengemban Misi sebagai Wakil Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (22/06) — Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan PKS se-Indonesia bertepatan dengan 'Strategi Transformatif, Kolaboratif, dan Kontributif Perempuan PKS Se-Indonesia' di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Rabu-Sabtu, (22-25/06/2022).

Ketua Panitia Bimtek Perempuan PKS se-Indonesia, Saadiah Uluputty mengatakan Bimtek kali ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

"Adapun anggota yang hadir berjumlah 135 dari 191 orang. Anggota yang tidak hadir disebabkan sakit ataupun anggota keluarganya ada yang meninggal dunia. Kita doakan agar lekas pulih dan yang keluarganya meninggal dunia diterima segala amal ibadah dan kebaikannya", ucap Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Tujuan Bimtek Perempuan PKS se-Indonesia adalah



menjadikan anggota legislatif perempuan semakin memadai dalam mengemban misi sebagai wakil rakyat, menjadi satu instrumen peningkatan kapasitas dan kapabilitas dan upaya pendidikan politik bagi kader perempuan, dan meningkatkan serta menguatkan kemampuan komunikasi antara parlemen dan publik.

"Selain itu, Bimtek ditujukan untuk mengoptimalkan

peran dan fungsi budgeting atau penganggaran, legislasi, dan pengawasan," sebutnya.

"Semoga kegiatan ini bisa menjadi satu oleh-oleh dan menjadi bekal untuk Perempuan PKS dalam berkiprah dan terus berkontribusi ke depannya", harap Saadiah.

Adapun agenda Bimtek ini berlangsung selama empat hari, tepatnya pada 22-25 Juni 2022. Pembukaan acara dilaksanakan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikh dan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Serangkaian acara diselenggarakan selama Bimtek ini, mulai dari pembekalan materi yang akan disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, Pakar Komunikasi Politik Dosen UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, CIO dan Senior Advisor Citra Inspira, Dian Anggraini Umar.



SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Ketua Pelaksana

"Tujuan Bimtek Perempuan PKS se-Indonesia adalah menjadikan anggota legislatif perempuan semakin memadai dalam mengemban misi sebagai wakil rakyat, menjadi satu instrumen peningkatan kapasitas dan kapabilitas dan upaya pendidikan politik bagi kader perempuan, dan meningkatkan serta menguatkan kemampuan komunikasi antara parlemen dan publik"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif

TEBAR
1.500.000
PAKET KURBAN
IDUL'ADHA 1443 H

Selamat Hari Raya
Idul Adha
1443 H

Dr. Salim

Ketua Majelis Syura PKS

#Berkurban
#Melayani
Indonesia

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI

Arahan Bimteknas Perempuan, Aleg PKS: Perempuan Harus Jadi Good Driver dan Tawarkan Solusi

KUTIPAN

Jakarta (23/06) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetyani, berkesempatan memberi arahan kepada aleg perempuan PKS se-Indonesia dalam agenda Bimtek Perempuan PKS.

Arahan disampaikan di Ruang Rapat Paripurna DPR RI Jakarta, Rabu (23/06). Agenda dimulai dengan tour keliling kompleks DPR, tepatnya foto bersama antar Aleg Perempuan PKS di depan gedung kura-kura.

"Bimtek kali ini menjadi momentum membahagiakan bagi saya dan Fraksi PKS DPR RI karena bisa menerima kunjungan ibu-ibu. Sesuatu yang sangat kami harapkan sejak lama, terlebih pertemuan kita sempat terhalang oleh pandemi Covid-19," ucap Netty.

Pengarahan diawali dengan pengenalan Ruang Rapat Paripurna DPR RI, mulai dari komponen-komponennya hingga fungsi dari masing-masing komponen. Setelah itu,



Netty mengenalkan konsep 'driver and passenger' yang dikutip dari buku berjudul Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger? yang ditulis oleh Rhonald Kasali.

"Passenger (penumpang) lebih leluasa dalam menjalankan aktivitas dan tidak memikirkan rute, bahkan bisa saja tertidur dan tak terasa sampai di kantor", ungkap Anggota Komisi IX DPR RI ini.

"Sedangkan driver (pengemudi) wajib menguasai rute jalan, memikirkan keselamatan dan kenyamanan penumpang, belum lagi harus

berurusan dengan kemacetan", sambungnya.

Driver tentu memiliki tanggung jawab besar. Berhadapan dengan risiko di jalan dan berpotensi mengalami kecelakaan, terlebih harus bertanggung jawab jika kecelakaan itu menimbulkan korban.

"Permasalahan di Indonesia sangat kompleks dan perlu dituntaskan. Maka dari itu, kita harus menjadi good-driver untuk kemajuan bangsa", ucap Netty.

"Melihat dari semangat ibu-ibu selama rangkaian acara, saya semakin yakin bahwa perempuan juga mampu menjadi bagian dari good-driver (menempati pos-pos kebijakan dan menjadi pemimpin penuh semangat)", sambungnya di hadapan para hadirin.

Netty mengungkap perempuan sudah mengisi sektor politik. PKS mewadahi perempuan untuk berkontribusi pada ranah kebijakan, terbukti dari tersebarnya Aleg perempuan di berbagai wilayah, bahkan menjabat sebagai Ketua DPRD dan Ketua Fraksi.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra

"Bimtek kali ini menjadi momentum membahagiakan bagi saya dan Fraksi PKS DPR RI karena bisa menerima kunjungan ibu-ibu. Sesuatu yang sangat kami harapkan sejak lama, terlebih pertemuan kita sempat terhalang oleh pandemi Covid-19,"

"Jika terlibat dalam formulasi kebijakan, maka semua lebih mudah diwujudkan. Perempuan sangat mampu melaksanakan segala hal. Bayangkan jika ibu sakit, maka suasana menjadi riweuh. Segala hal diurus oleh ibu,

meliputi jadwal sekolah dan les anak, jenis pakaian yang masuk ke mesin cuci, hingga memetakan hendak masak apa dan telah disesuaikan dengan isi bahan makanan di lemari es.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Bimteknas PKS, Pakar Branding: Aleg Perempuan PKS Perlu Muncul dengan Branding Terbaik

KUTIPAN

Jakarta (23/06) — Pakar Branding yang juga Senior Advisor Citra Inspira, Dian Anggraini Umar, narasumber kedua dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan PKS se-Indonesia di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/06) menyampaikan materi yang bertemakan Praktik Personal Branding dalam Meningkatkan Citra Diri dan Partai.

“Apakah personal branding itu sudah benar-benar dikuasai oleh politisi? Sepertinya belum ada perubahan, sebab tokohnya itu-itu lagi. Contoh, di PKS banyak orang pintar, tetapi masih itu-itu saja yang muncul di publik terus menerus”, kata Dian sebagai pembuka materi. Fenomena semacam itu, menurut Dian, perlu dievaluasi karena terkesan monoton.

“Akhirnya, orang-orang menjadi bingung ‘siapa yang harus dipilih?’ Ini pertanda bahwa personal branding masih



menjadi PR besar”, sambungnya.

Dian mengungkapkan bahwa situasi saat ini sangat berbeda dengan 10 tahun lalu karena ada transformasi digital. Sebuah isu yang belum sampai ke media justru telah dibicarakan dalam lingkaran diskusi. Semua terjadi karena media sosial.

“Ada selebgram, TikTokers

sebagai penguasa medsos dengan pengaruh yang kuat. Kemudian, distorsi pesan saat ini sangat kompleks. Sebelum ada medsos, komunikasi berjalan satu arah (wartawan dengan narasumber). Sekarang, kita belum bicara, publik sudah bicara, ditambah lagi dengan keganasan buzzer”, tutur Dian.

Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa aleg perempuan PKS perlu membentuk branding personal dan partai secara lebih baik lagi.

“PKS bagus kredibilitasnya, tetapi lawan politik memberi framing negatif. Ini menjadi tugas bagi ibu-ibu untuk bagaimana cara yang tepat guna meng-counter-nya”, sambung Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ini.

Mengingat, imbuh Dian lagi, di era post-truth ini, publik sering mengabaikan fakta, dan yang penting informasi itu sesuai dengan ekspektasi dan persepsinya.

“Kini, remot kendali dipegang oleh publik, saat tidak suka langsung dihajar. Tokoh publik seakan menjadi produk



DIAN ANGGRAINI UMAR, MSi
CIO and Senior Advisor Citra Inspira

“Untuk membentuk dan kembangkan citra diri, jangan biarkan publik membentuk citra diri Anda. Citra bukan sekadar membangun persepsi, namun bagaimana kita menciptakan nilai untuk investasi jangka panjang.”

yang tak luput dari skala penilaian”, ucapnya lagi.

Maka dari itu, Dian menegaskan, personal branding menjadi strategi yang sangat efektif bagi politisi untuk menarik atensi masyarakat.

“Kenali diri Anda: Siapa

Anda? Siapa yang perlu tahu tentang Anda? Bagaimana mereka bisa mengetahui Anda? Mengapa mereka harus peduli kepada Anda?”, tegas Dian di hadapan Aleg Perempuan PKS.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Bimtek Perempuan PKS, BKKBN: **Kesiapan** adalah Awal Ketahanan Keluarga

KUTIPAN

Jakarta (24/06) — Bimtek Perempuan PKS telah memasuki hari ketiga. Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, Dwi Listyawardani, berkesempatan menjadi narasumber pada Jumat (24/06), pagi ini.

Tema yang disampaikan adalah terkait 'Konsep Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

"Program BKKBN selalu mendapat dukungan yang luar biasa dari legislatif, khususnya Komisi IX DPR RI. Namun, sampai saat ini BKKBN Kabupaten/Kota dan Provinsi masih kurang dilirik oleh pemerintahan daerah, sehingga selalu lari ke pemerintahan pusat", ungkap Dwi.

Sebuah keluarga harus bisa mengatasi permasalahan dan hambatan. Harus ada pengembangan potensi bagi seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga yang baik merupakan modal dasar untuk mewujudkan ketahanan nasional. Maka dari itu, ketika ada ancaman melanda, maka kita akan senantiasa kuat



menghadapinya.

"Kesiapan keluarga adalah titik awal keluarga yang berketahanan. Berkeluarga adalah hal yang sangat perlu dipersiapkan. Dimensi keluarga itu luas dan harus balance. Jangan sampai fokus pada satu hal saja, misal cuma ke reproduksi tapi melupakan kesiapan. Angka percepatan semakin hari kian meningkat mencapai angka 500 ribu per tahun. Pasangan kini begitu mudahnya mengucap kata berpisah. Tentu anak-anak menjadi korban", katanya.

"Pembangunan SDM harus dari hulu (istilahnya dari pabriknya). Kita, anak-anak kita, remaja kita harus mempersiapkan

kan masa depan yang baik. Mulai dari mempersiapkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang benar-benar siap berkeluarga. Beri edukasi dan pengetahuan", sambungnya.

Dwi mengingatkan agar anak-anak dihindarkan dari perilaku seksual yang berisiko. Perbaiki 'pabrik' SDM kita. Saat ini, masih banyak ditemukan kualitas pengantin di Indonesia masih cukup buruk. Perhatikanlah sepuluh dimensi kesiapan keluarga, kesiapan usia salah satunya.

"Kedewasaan kadangkala ditandai dari segi reproduksi saja, padahal ini adalah kekeliruan, sebab konsep dewasa itu komprehensif", ucapnya.

Sebagai upaya untuk memfasilitasi persiapan membentuk keluarga, maka BKKBN mencetuskan Aplikasi Siap Nikah. Setiap calon pengantin bisa menilai dirinya sendiri. Jika nilainya di atas 85, maka sudah siap menikah. Terdapat program unggulan lainnya sebagai upaya membentuk ketahanan keluarga, meliputi riset Indeks Pembangunan Keluarga melalui iBangga, Kampung Keluarga Berkualitas, DASHAT (Dapur



Dr. Ir. DWI LISTYAWARDANI, M.Sc
Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN

"Kesiapan keluarga adalah titik awal keluarga yang berketahanan.

Berkeluarga adalah hal yang sangat perlu dipersiapkan. Dimensi keluarga itu luas dan harus balance. Jangan sampai fokus pada satu hal saja, misal cuma ke reproduksi tapi melupakan kesiapan"

Sehat Atasi Stunting), dan Bapak Asuh Anak Stunting.

Berbicara ketahanan keluarga tidak terlepas dari permasalahan kesehatan anak, salah satunya stunting. Angka stunting masih tinggi di Indonesia hingga menembus angka 24,4% atau seperempat dari balita di seluruh Indonesia

mengalami stunting.

"Dampak stunting bukan hanya masalah fisik, namun juga tergolong perkembangan kecerdasan. Anak-anak stunting sel-sel otaknya jauh lebih jarang. Maka dari itu, mari kita siapkan keluarga berkualitas dalam mewujudkan generasi cerdas dan sehat", pungkasnya.



Pakar Komunikasi Politik: Aleg Perempuan PKS **Wajib** **Kuasai** Pengetahuan Politik

KUTIPAN

Jakarta (23/06) — Pakar Komunikasi Politik yang juga Dosen UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, hadir sebagai narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan PKS se-Indonesia di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/06).

Gun Gun membawakan materi yang bertemakan Urgensi Personal Branding untuk Komunikasi Politik Efektif.

"PKS semakin ke sini, semakin menarik, dalam arti semakin terbuka dengan publik dan perbincangannya kian luas serta mendalam. Hal ini dapat menjadi modal bagi PKS dalam membangun optimisme untuk maju dalam kontestasi tahun 2024", kata Gun Gun.

Komunikasi politik, imbuhnya, merupakan niat mengirim pesan untuk memengaruhi penerima pesan tersebut.

"Personal branding adalah salah satu bagian dari komunikasi politik. PKS perlu komunikasi politik dalam rangka membangun personal branding agar bisa menarik minat pemilih", sambungnya.



Personal branding, kata Gun Gun, adalah upaya strategis mengembangkan identitas untuk menarik perhatian dan minat masyarakat.

"Personal branding bertujuan untuk menguatkan peran, kebermanfaatan, dan kinerja politik. Kebermanfaatan bisa sangat terasa jika berhasil dalam membentuk personal branding, sebagaimana diungkapkan Doktor Universitas Padjajaran ini," ujar Gun Gun.

"Ada tiga sumber dalam mengelola komunikasi, yaitu human, capital, dan information. Selain itu, basis

data juga sangat penting dan menjadi kunci sukses bagi komunikasi. Maka dari itu, pengetahuan sangat dibutuhkan dalam menyukseskan komunikasi politik para politisi", imbuhnya.

Gun Gun memaparkan studi kasus dari film 'Game Change' sebagai sebuah pembelajaran bagi politisi untuk berkaca dari peristiwa kegagalan Gubernur Alaska, Sarah Palin, dalam kontestasi pemilihan presiden Amerika Serikat. Kegagalan itu disebabkan oleh kurangnya personal branding. Sarah Palin memiliki poin plus sebagai pejabat publik dan perwakilan perempuan. Sayangnya, pengetahuan geo-politiknya kurang.

"Kurangnya pengetahuan dapat menjerumuskan politisi. Sarah Palin pernah ditanya wartawan terkait kebijakan menghadapi Rusia dan negara-negara lainnya malah dijawab ngelantur. Jadi, tidak cukup sebagai politisi perempuan saja. Orang jadi berpikir, 'Benar enggak ya dia ini kompeten?', " tutur Gun Gun.



Dr. GUN GUN HERYANTO, M.Si

Pakar Komunikasi Politik – Dosen UIN Jakarta

"Kurangnya pengetahuan dapat menjerumuskan politisi. Sarah Palin pernah ditanya wartawan terkait kebijakan menghadapi Rusia dan negara-negara lainnya malah dijawab ngelantur.

Jadi, tidak cukup sebagai politisi perempuan saja. Orang jadi berpikir, 'Benar enggak ya dia ini kompeten?',



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Wagub Chusnunia: Kedatangan Dr. Salim, **Berkah** untuk Lampung

KUTIPAN

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung sangat menyambut baik kunjungan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim ke Provinsi Lampung.

Hal tersebut dikemukakan Nunik, sapaan akrab Chusnunia, saat memberikan sambutan di acara Silaturahmi Kebangsaan Dr. Salim bersama tokoh masyarakat se Lampung, Rabu malam (15/6), di Ball Room Hotel Bukit Randu.

Menurut Nunik, Provinsi Lampung beberapa kali mendapat agenda nasional, sebelumnya ada Mukhtar NU, kemudian kegiatan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), sekarang Lampung kembali kedatangan rombongan dari DPP PKS yang langsung dikomandoi Ketua Majelis Syura.

“Semoga kedatangan Dr. Salim beserta rombongan DPP PKS menjadi keberkahan bagi Lampung. Semakin banyak yang

datang ke Lampung, maka semakin baik. Semoga Lampung akan semakin berjaya lagi dan terus membangun dengan kehadiran dan dukungan tokoh-tokoh nasional,” kata Nunik.

Nunik juga sedikit menjelaskan, bahwa Fraksi PKS di DPRD Provinsi Lampung termasuk yang mendukung program-program pemerintah provinsi untuk mewujudkan Lampung berjaya. Fraksi PKS mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat gubernur, sehingga semua berjalan lancar dan bisa terlaksana.



Hj. CHUSNUNIA CHALIM, Ph.D.
Ketua Majelis Syuro PKS

“Semoga kedatangan Dr. Salim beserta rombongan DPP PKS menjadi keberkahan bagi Lampung. Semakin banyak yang datang ke Lampung, maka semakin baik. Semoga Lampung akan semakin berjaya lagi dan terus membangun dengan kehadiran dan dukungan tokoh-tokoh nasional”

Dr. Salim: Kalau Sekadar Berkolaborasi Saja Tak Mampu, **Kapan Kita** Akan Membangun Bangsa Ini?

KUTIPAN

Menurut Dr. Salim, sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, tapi belum mampu berdaulat dan menyejahterakan rakyatnya. Kemerdekaan Indonesia hanya beda dua hari dengan Korea Selatan, Korea Selatan merdeka tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945.

Bandar Lampung (16/06) — Dalam pesan kebangsaan yang disampaikan Dr. Salim di acara Silaturahmi Kebangsaan Bersama Tokoh Se Lampung, beliau menuturkan kesedihannya terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Menurut Dr. Salim, sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, tapi belum mampu berdaulat dan menyejahterakan rakyatnya. Kemerdekaan Indonesia hanya beda dua hari dengan Korea Selatan, Korea Selatan merdeka tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus

1945.

"Tapi bisa dilihat kondisinya saat ini, Korea Selatan begitu maju, negaranya berdaulat, rakyat sejahtera. Korea Selatan sudah sejajar dengan bangsa-bangsa besar lain di dunia. Apa yang salah dengan bangsa kita? Dalam pandangan saya kenapa kita belum bisa maju adalah karena kita belum saling berkolaborasi untuk memajukan bangsa ini," kata Dr. Salim, Rabu (15/06).

Kunci keberhasilan adalah saling bekerjasama. Saling berkolaborasi mewujudkan cita-cita bangsa. Dr. Salim mengajak

kita untuk melihat alam disekitar kita, bahwa alam semesta berserta mahluk yang ada di dalamnya saling bekerja sama, mereka justru bekerja dan berbuat untuk mahluk yang lain.

"Maka kemudian pertanyaan untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia, sejauh mana kita telah berbuat untuk bangsa ini? Sejauh mana kita mengukir sejarah dan warisan untuk bangsa ini? Kalau sekadar berkolaborasi, bekerja bersama-sama kita tidak mampu, kapan kita akan membangun negeri ini," ucap Dr. Salim.

Maka dari itu Dr. Salim mengajak seluruh anak bangsa untuk bergandengan tangan bersama mewujudkan cita-cita para pendahulu bangsa Indonesia.

"Saya yakin, siapa pun kita, apa pun partai kita, warna baju kita, kita ingin Indonesia diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Mari kita berkolaborasi, bekerjasama memajukan dan mewujudkan cita-cita luhur para pendahulu kita," kata Dr. Salim



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syuro PKS

"Saya yakin, siapa pun kita, apa pun partai kita, warna baju kita, kita ingin Indonesia diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Mari kita berkolaborasi, bekerjasama memajukan dan mewujudkan cita-cita luhur para pendahulu kita,"



Silaturahmi dengan Masyarakat Adat Lampung

Dr. Salim Terima Gelar Adat Yang Mulia Datuan Satria Negara

KUTIPAN

Bandar Lampung - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri berkunjung ke Provinsi Lampung dalam rangkaian kegiatan Dr. Salim menyapa Indonesia dari tanggal 14-16 Juni.

Tiba di Bandara Raden Intan, Dr. Salim disambut dengan prosesi adat penyambutan secara singkat dan khidmat, kemudian rombongan langsung menuju Rumah Adat Kedatuan Keagungan Lampung di jalan Suttan Haji, Sepang Jaya Labuhan Ratu.

Disambut langsung oleh tokoh adat Kedatuan Keagungan Lampung Mawardi Harirama Gelar Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Dr. Salim disambut hangat dengan upacara penyambutan di depan pintu masuk.

Dalam sambutannya, Mawardi Harirama mengatakan sosok Dr. Salim sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dr. Salim pernah menjadi Menteri Sosial dan Dutabesar Indonesia untuk

Arab Saudi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hadirnya Dr. Salim ke Lampung, bersilaturahmi dengan kami di Kedatuan Keagungan Lampung tentunya menjadi kehormatan bagi kami. Untuk makin menguatkan tali silaturahmi dan persaudaraan, maka saya melakukan muaghay kepada Dr. Salim untuk menjadi bagian dari keluarga kami. Pemberian gelar adat sebagai bentuk penghormatan dan bentuk pengikat tali persaudaraan antara Salim Segaf Al Jufri dengan masyarakat adat Lampung," kata Mawardi Harirama.

Mawardi melanjutkan, Kedatuan Keagungan Lampung merupakan salah satu warisan

budaya Lampung dan tetap dilestarikan sampai saat ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Lampung sangat dalam. Nilai-nilai budaya Lampung juga seiring jalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Saat diminta memberi sambutan, Dr. Salim mengatakan bahwa menjadi kebanggaan tersendiri karena telah dianggap menjadi bagian dari masyarakat Lampung

"Suatu kebanggaan karena kami dianggap menjadi bagian dari masyarakat Lampung. Saya merasa berada di rumah sendiri. Lampung ini luar biasa, dari segi bangunan penuh filosofi begitu juga dari tokoh adatnya. Muatan religius dan budayanya luar biasa sekali. Ini patut dijaga dan dilestarikan," ucap Dr. Salim.

Dr. Salim juga sangat bersyukur atas kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Ia pun menginstruksikan kepada Ketua Fraksi PKS untuk meja dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia untuk dijaga dan dilestarikan.

"Bersyukur pada Allah negeri kita memiliki adat



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syuro PKS

"Suatu kebanggaan karena kami dianggap menjadi bagian dari masyarakat Lampung.

Saya merasa berada di rumah sendiri.

Lampung ini luar biasa, dari segi bangunan penuh filosofi begitu juga dari tokoh adatnya. Muatan religius dan budayanya luar biasa sekali. Ini patut dijaga dan dilestarikan"

budaya yang beragam. Saya menginstruksikan ketua fraksi untuk mempertahankannya, bukan hanya retorika, tapi dari

sisi peraturan dan undang-undang juga," kata Dr. Salim.

Serahkan Souvenir Perahu Layar, Ketua FPKS : Ini tanda PKS Berlayar Bersama Gubernur Lampung

KUTIPAN

Bandar Lampung (14/06) — Ada celetukan menggelitik dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat Dr. Salim menyerahkan suvenir kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Mahan Agung, Selasa (14/06).

Dr. Salim menyerahkan suvenir berupa perahu layar. Saat menyerahkan suvenir tersebut, Jazuli mengatakan perahu layar adalah simbol bahwa PKS akan berlayar bersama gubernur Lampung.

Sontak, celetukan ini mengundang gelak tawa, karena ada yang mengartikan ini tanda PKS akan mengusung Arinal Djunaidi di periode keduanya.

Sementara Dr. Salim mengatakan perahu layar adalah simbol bahwa PKS ingin

melaju bersama segenap elemen bangsa.

"PKS siap berkolaborasi dengan semua kepala daerah yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan PKS yaitu melayani dan menyejahterakan rakyat," tutup Dr. Salim.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Dr. Salim menyerahkan suvenir berupa perahu layar. Saat menyerahkan suvenir tersebut, Jazuli mengatakan perahu layar adalah simbol bahwa PKS akan berlayar bersama gubernur Lampung.

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif, Aktif, Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

Anggota FPKS Minta Pemerintah Bangun Ekosistem Tata Niaga Pangan

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, meminta kepastian keseriusan pemerintah dalam merespon situasi pangan yang mulai mencekam di beberapa belahan dunia, mengingat anggaran di kementerian pertanian masih terus merangkak turun dari tahun ke tahun.

Pendapat ini disampaikan Andi Akmal pada diskusi Bisnis Forum yang turut dihadiri oleh Ketua Badan Pangan Nasional, praktisi petani & Peneliti Indef.

Akmal mengungkapkan, lima tahun terakhir APBN kementerian terus turun dengan rincian: APBN 2017 Rp22.107.123.492.000,-, APBN 2017 Rp24.146.411.929.000,- APBN 2018 Rp23.820.762.303.000,- APBN 2019 Rp21.686.516.683.000,-, APBN 2020 Rp15.776.401.436.000,- APBN 2021 Rp16.247.369.044.000,-, APBN 2022 Rp14.665.652.051.000,- dan APBN 2023

(pagu indikatif) Rp13.725.351.356.000,-. Ini menurut Akmal pemerintah terbukti kurang respon terhadap persoalan pangan.

"Saat ini para petani belum merasa tenang ketika sudah menanam komoditas pangan, tapi tidak ada jaminan harga yang menguntungkan karena selalu dibayangi pasar yang diganggu oleh produk impor. Bahkan alasan cuaca dan lemahnya faktor distribusi termasuk logistik perdagangan menjadi alasan tidak menentukannya harga karena sifat produk pangan terutama hortikultura

yang mudah rusak", tutur Akmal.

Akmal menuding, bahwa saat ini negara masih menganut pasar bebas yang diawali oleh kebijakan pemerintah yang pernah berhutang kepada IMF sehingga salah satu implikasinya, Bulog yang tadinya sebagai lembaga penyangga pangan yang sangat efektif di lapangan, kini berubah menjadi lembaga profit berupa perusahaan.

Akmal menambahkan, sejak Bulog berubah fungsi, Negara mengalami kekacauan dalam mengendalikan stok pangan di gudang-gudang yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Mekanisme tata niaga pangan menjadi pasar bebas yang fluktuatif tergantung situasi pasar yang pemerintah sulit mengendalikan dengan intervensi harga atau operasi pasar karena tools yang dipakai pemerintah sangat terbatas," ucap Akmal.

"Implementasi UU no 18 tahun 2012 tentang pangan masih belum optimal dijalankan amanatnya. Tidak ada lembaga negara yang berfungsi seperti BULOG ketika masih berbentuk Badan. Saat ini Komisi IV DPR masih terus mendorong Kementan agar efektif membina para petani untuk meningkatkan produksi pangan di sentra-sentra komoditas baik tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura", urai Akmal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Implementasi UU no 18 tahun 2012 tentang pangan masih belum optimal dijalankan amanatnya. Tidak ada lembaga negara yang berfungsi seperti BULOG ketika masih berbentuk Badan. Saat ini Komisi IV DPR masih terus mendorong Kementan agar efektif membina para petani untuk meningkatkan produksi pangan di sentra-sentra komoditas baik tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura"

Wakil Ketua FPKS Apresiasi Rencana Presiden Jokowi Temui Presiden Rusia dan Ukraina

KUTIPAN

Jakarta (22/06) — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, melalui konferensi persnya, memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mendukung langkah pemerintah untuk menciptakan perdamaian antara kedua negara.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang berencana akan menemui Presiden Rusia dan Ukraina untuk misi perdamaian dan kemanusiaan. Keberangkatan Presiden ini harus didukung bersama dan semoga Indonesia akan kembali memainkan peran signifikan dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia, karena perang ini membawa dampak negatif bagi kita semua,” ungkap Sukamta, Rabu, (22/06).

Puluhan ribu warga sipil tewas akibat perang ini. Jutaan warga Ukraina juga menjadi pengungsi. Dampak perang dirasakan oleh kita semua, juga khususnya oleh negara berkembang dan berpenghasilan rendah. Harga barang-barang semakin mahal. Di beberapa negara inflasi meningkat tajam. Negara-negara Afrika sangat terpengaruh oleh krisis akibat perang ini. Harga gandum, minyak goreng, bahan bakar, dan pupuk, semakin melonjak. Konflik ini juga berdampak pada meningkatnya ancaman krisis pangan dan energi global. “Karenanya, Indonesia

juga penting untuk membawa misi tentang pangan dan energi,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Sukamta yang juga sebagai Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya mendorong agar Indonesia bisa memainkan peran konkret dalam menghentikan peperangan dan mewujudkan perdamaian antarnegara yang bertikai.

“Saat rapat resmi dengan Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi, maupun lewat media, Saya berkali-kali mendorong agar Presiden Jokowi turun langsung berkontribusi menjadi juru damai atas konflik ini dengan perannya sebagai Presidensi G20 yang harus dioptimalkan,” katanya.

Kunjungan Presiden Jokowi ini merupakan langkah konkret tersebut, yang tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab Indonesia yang saat ini ditunjuk sebagai Presidensi G20. Ini tanggung jawab berat, karena diamanatkan pada situasi yang tidak mudah, pandemi belum resmi berakhir dan terjadinya perang Ukraina-Rusia.

Menurut Doktor lulusan Manchester Inggris ini, kondisi tersebut menjadi tantangan yang sangat menarik untuk kita hadapi. Leadership Indonesia mendapatkan ruang dan momentum yang mungkin akan dikenang 20-30 tahun yang akan datang bahwa Indonesia sebagai Presidensi G20 semoga



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

“Keberangkatan Presiden ini harus didukung bersama dan semoga Indonesia akan kembali memainkan peran signifikan dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia, karena perang ini membawa dampak negatif bagi kita semua”

berhasil menjadi penengah Rusia dan Ukraina. Ini momentum bagi Indonesia untuk bisa mendamaikan negara-negara yang bertikai.

“Tentu kita semua berharap pertemuan dengan 2 pemimpin negara yang sedang bertikai tadi membawa hasil

yang sangat berarti bagi proses penghentian perang dan terciptanya perdamaian. Agar kita semua bisa segera pulih dari keterpurukan ekonomi sebagai dampak dari pandemi,” harap legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini

Aleg PKS: Wabah PMK adalah Buah dari Regulasi yang Ugal-Ugalan

KUTIPAN

Jakarta (19/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah terkait semakin meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Menurut Slamet, wabah PMK yang masuk kembali ke Indonesia belakangan ini, tak lepas dari kebijakan Pemerintah yang ugal-ugalan dengan mengizinkan impor ternak dari negara yang belum bebas PMK.

"Menurut analisa saya, ini karena regulasi tentang hewan atau produk hewan impor yang diubah Pemerintah tahun 2016, yakni dari country base ke zona base. Setelah 2016, perubahan kedua dilakukan pada tahun 2022 oleh Pemerintah. Makin ugal-ugalan. Makin bebas. Tak hanya BUMN, swasta juga boleh impor daging dari negara yang belum bebas PMK", ungkap Slamet dalam keterangan di acara salah satu media nasional, (17/06).

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Pemerintah kurang sigap

dalam mengatasi wabah PMK sejak awal.

"Secara umum, terus terang, penanganan Pemerintah ini terlambat. Seharusnya apabila sudah diadikasikan sejak awal, PMK tidak akan meluas. Namun, tidak dilakukan dengan cepat. Satu-satunya cara memang adalah pemusnahan. Dengan pemusnahan, perlu ada ganti rugi sebagai konsekuensi langsunnya. Di titik ini, negara harus hadir dengan memberi ganti rugi ke peternak", tegas Anggota DPR dari Dapil Sukabumi ini.

Namun, Slamet pun mengungkapkan, bahwa Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, di awal tak memiliki hitungan untuk ganti rugi sama sekali. Hal itu pun sangat disayangkan oleh

Anggota DPR Komisi IV.

"Awalnya kami sangat kecewa. Karena ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP), pihak Kementan belum bisa menyebut berapa anggaran yang diperlukan untuk menangani PMK ini. Akhirnya, kami waktu itu meminta rapat diskors sebelum ada hitungan yang jelas, lalu muncullah 4,4 triliun, yang sebagiannya akan digunakan untuk kompensasi akibat pemusnahan", terang Slamet.

Terakhir, Slamet mengimbau kepada seluruh peternak untuk proaktif dalam menanyakan soal ketersediaan vaksin di wilayah masing-masing kepada dinas terkait. Mengingat, berdasar informasi, vaksin sudah mulai masuk ke Indonesia.

"Pesannya untuk teman-teman peternak, terus komunikasi dengan dinas terkait di daerahnya masing-masing untuk penanganan wabah ini. Jika ada problem, tolong informasikan ke kami agar bisa push ke Kementan", pungkasnya.



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

Secara umum, terus terang, penanganan Pemerintah ini terlambat. Seharusnya apabila sudah diadikasikan sejak awal, PMK tidak akan meluas. Namun, tidak dilakukan dengan cepat. Satu-satunya cara memang adalah pemusnahan. Dengan pemusnahan, perlu ada ganti rugi sebagai konsekuensi langsunnya. Di titik ini, negara harus hadir dengan memberi ganti rugi ke peternak

Revisi UU tentang Konservasi, Aleg PKS Nilai Pelaksanaannya **harus Prioritas** pada Kelestarian bukan Pemanfaatan saja

KUTIPAN

Jakarta (16/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mempunyai perhatian yang besar pada pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia.

Menurut Johan, revisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) penting segera dilakukan sebab sebelumnya UU ini hanya didasarkan oleh pasal 3 ayat 3 UUD 1945 sebelum amandemen yang hanya fokus pada aspek pemanfaatan saja.

"Pasca amandemen konstitusi terutama pada pasal 28 H dari UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, konsekuensi revisi UU konservasi harus memberi prioritas pada aspek kelestarian demi mewujudkan amanat konstitusi

bahwa lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi semua orang," terang Johan.

Hal ini diungkapkan Johan saat mengikuti acara focus group discussion (FGD) mengenai revisi UU No. 5/1990 bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung di Jakarta Rabu, (15/06/2022).

Johan menandaskan revisi UU ini perlu menitikberatkan pada aturan perlindungan konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya untuk terus menjaga kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya.

"Karena kita memiliki 554 unit Kawasan konservasi yang

mencapai 27 juta Ha," ujarnya.

Politisi PKS ini

menegaskan perlu diperkuat perlindungan ekosistem yang memperhatikan tantangan ke depan terutama adanya kepastian hukum kewajiban melindungi alam dalam hubungan antara masyarakat dengan sumberdaya alamnya, serta sanksi yang tegas terhadap kejahatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya perlu diperkuat untuk menimbulkan efek jera.

"Saya tegaskan bahwa konservasi merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga semua aktivitas pembangunan tidak boleh merusak atau menurunkan daya dukung lingkungan apalagi sampai mengganggu keseimbangan ekosistem. Artinya keberlanjutan ekosistem merupakan aspek utama dalam prinsip pembangunan nasional" cetus Johan.

Johan juga mengusulkan perlunya dibuat ketentuan yang mengatur tentang penetapan



H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya tegaskan bahwa konservasi merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga semua aktivitas pembangunan tidak boleh merusak atau menurunkan daya dukung lingkungan apalagi sampai mengganggu keseimbangan ekosistem. Artinya keberlanjutan ekosistem merupakan aspek utama dalam prinsip pembangunan nasional"

satwa Indonesia sebagai aset negara, dan simbol kekayaan dan kedaulatan negara agar ada kekuatan hukum atas kekayaan hayati negara.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini berharap revisi UU

konservasi ini dijadikan dasar kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Fraksi PKS Minta Pengendara Bersandal Jepit **Jangan Ditilang**

KUTIPAN

Jakarta (14/06) - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, meminta kepada Polri untuk tidak perlu menindak pengendara sepeda motor yang hanya menggunakan sandal jepit saat berkendara.

Menurut Hamid, penggunaan sandal hanyalah bagian kecil dari aspek-aspek berbahaya dalam berkendara. Oleh sebab itu, ia berpendapat seharusnya Polri dan Pemerintah pada umumnya dapat mengedepankan aspek lain yang jauh lebih penting.

"Kami setuju dan memahami pentingnya keselamatan pada saat berkendara, namun demikian FPKS juga mengingatkan bahwa banyak sekali aspek yang menunjang keselamatan berkendara yang semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Beberapa aspek tersebut diantaranya aspek regulasi, aspek penegakan hukum, aspek infrastruktur, aspek kendaraan dan aspek

pengendaranya itu sendiri", ujar Hamid.

Lebih lanjut, ia pun mencontohkan bahwa banyak aspek penting yang justru perlu diperhatikan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.

"Misalnya, aspek penegakan hukum, saat masih banyak pengendara yang melawan arus. Demikian pula di jalan-jalan kampung masih banyak juga pengendara yang tidak menggunakan helm yang tidak terkena sanksi. Belum lagi masalah infrastruktur jalan yang belum baik, jalan yang berlubang juga turut berkontribusi terhadap angka kecelakaan", jelasnya.

Terkait penegakan hukum, imbuhan Hamid, Polri dan Pemerintah wajib fokus pada

kasus-kasus yang melanggar Undang-Undang terlebih dahulu.

"Aturan-aturan tambahan seperti pelarangan penggunaan sandal pada pengendara motor FPKS meminta Polri melakukan pendekatan humanis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat", ungkapnya.

Sebelumnya, Polri dikabarkan telah memberlakukan larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara sepeda motor setelah ditemukan banyak pengendara yang menggunakan sandal jepit selama operasi patuh 2022 yang masih berjalan hingga saat ini.

Pertimbangan terhadap pemberlakuan aturan ini adalah karena sandal tak punya perlindungan untuk jari, punggung kaki ataupun bagian samping telapak, sehingga berisiko cedera ketika terbentur benda keras atau terkena mesin atau knalpot yang panas.



Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

Kami setuju dan memahami pentingnya keselamatan pada saat berkendara, namun demikian FPKS juga mengingatkan bahwa banyak sekali aspek yang menunjang keselamatan berkendara yang semuanya tidak bisa berdiri sendiri. Beberapa aspek tersebut diantaranya aspek regulasi, aspek penegakan hukum, aspek infrastruktur, aspek kendaraan dan aspek pengendaranya itu sendiri"

Bendungan Meninting Jebol, Aleg PKS: Pemerintah Perlu Antisipasi Dampaknya

KUTIPAN

Jakarta (18/06) -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengaku prihatin atas kejadian jebolnya tanggul di kawasan Bendungan Meninting beberapa waktu lalu

la menegaskan bahwa Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses pembangunan Bendungan Meninting tersebut.

"Perlu dilakukan pengujian kualitas konstruksi bendungan secara berkala sejak dini selama proses pembangunan, jangan sampai setelah selesai dan dioperasikan ternyata bendungan tersebut tidak mampu menahan air. Hal ini tentunya dapat mengancam keselamatan warga yang tinggal di dekat bendungan", ujar Suryadi kepada wartawan di Jakarta, (18/06).

Lebih lanjut, Suryadi meminta selama pembangunan Bendungan Meninting, pihak-pihak terkait wajib selalu

memantau dan mengantisipasi pengumuman BMKG terkait curah hujan dan menyiapkan antisipasinya agar tidak terjadi kejadian serupa yang berdampak ke daerah sepanjang aliran Sungai Meninting.

"Pemerintah dan pihak terkait harus memperhatikan bendungan-bendungan lain dan mewaspadai segala bentuk anomali cuaca yang terjadi di masa yang akan datang", ungkapnya.

Sebelumnya, hujan lebat yang mengguyur daerah pegunungan meninting pada Jumat, 17 Juni 2022, menyebabkan meluapnya Sungai Meninting di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Kepada itu, peristiwa mengakibatkan tanggul penahan air menuju terowongan Bendungan Meninting jebol.

Sebagai akibat dari kejadian ini, beberapa alat berat milik PT. Hutama Karya Persero dan PT. Bahagia Bangun Nusa tersapu luapan air. Sedangkan kerugian juga dialami oleh warga yang sawahnya berada di jalur aliran Sungai Meninting karena tanaman padi mereka menjadi rusak diterjang banjir.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"Perlu dilakukan pengujian kualitas konstruksi bendungan secara berkala sejak dini selama proses pembangunan, jangan sampai setelah selesai dan dioperasikan ternyata bendungan tersebut tidak mampu menahan air. Hal ini tentunya dapat mengancam keselamatan warga yang tinggal di dekat bendungan



Aleg PKS **Prihatin** dalam Waktu 6 Bulan Terjadi 95 Kasus Kecelakaan di Pelintasan Sebidang KA

KUTIPAN

Tasikmalaya (21/06) — Untuk menghindari terulangnya kecelakaan di pelintasan kereta api, terutama yang tidak memiliki izin, PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) kembali menutup beberapa pelintasan di wilayah Jabotabek dan Banten pada minggu ini.

Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat menuturkan, kecelakaan lalu lintas pada pelintasan sebidang kereta api masih terus terjadi. Dalam periode Januari hingga Juni 2022, diketahui, telah terjadi sebanyak 95 kecelakaan dipelintasan.

“Upaya penutupan yang dilakukan oleh PT KAI sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94. Yakni, untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup,” sebut Politisi PKS ini.

Menurut Toriq, maraknya

kecelakaan di pelintasan sebidang kereta api dapat dicegah andaikan pemangku kebijakan dibidangnya mampu melaksanakan kewajibannya secara benar dan proporsional. Kemudian pengguna jalan disiplin saat berlalu lintas.

“Selama komitmen penanggungjawab dibidangnya belum dilaksanakan dengan konsisten. Saya pesimis, musibah tabrakan pada pelintasan sebidang yang memakan korban, baik jiwa dan materi, dapat diminimalisir,” ujarnya.

Toriq menambahkan, sangat jelas peraturan menyebutkan Pemerintah Pusat

untuk Jalan Nasional, Gubernur untuk jalan Provinsi, dan Bupati atau Wali Kota untuk jalan Kabupaten dan Kota serta Desa, bahwa maksimal dalam setahun sebuah pelintasan sebidang harus dievaluasi.

“Karenanya begitu gamblang, siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan di pelintasan sebidang, khususnya yang tidak memiliki izin. Selama ini proses penyidikan hanya melalui pada pengemudi kendaraan bermotor dan pihak penyelenggara perkeretaapian,” tuturnya.

Toriq menyebutkan juga, selain melakukan penutupan, PT KAI memiliki hak untuk mengusulkan pembangunan fly over atau underpass di pelintasan sebidang kereta api kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Terutama di jalan utama yang sarat dengan kendaraan. Demi mencegah jatuh korban kembali,” tutup Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

“Maraknya kecelakaan di pelintasan sebidang kereta api dapat dicegah andaikan pemangku kebijakan dibidangnya mampu melaksanakan kewajibannya secara benar dan proporsional. Kemudian pengguna jalan disiplin saat berlalu lintas. Selama komitmen penanggungjawab dibidangnya belum dilaksanakan dengan konsisten. Saya pesimis, musibah tabrakan pada pelintasan sebidang yang memakan korban, baik jiwa dan materi, dapat diminimalisir”

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atakalif Substantif

#MIMBAR



DEMOKRASI KEBANGSAAN FRAKSI PKS DPR RI

Bentuk komitmen kebangsaan Fraksi PKS dengan membahas isu-isu fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Menghadirkan tokoh PKS, tokoh bangsa dan pakar yang terkemuka.



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI

Legislator PKS: Tiga PR Krusial Menanti Menteri Perdagangan Baru Zulkifli Hasan

KUTIPAN

Jakarta (15/06) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyampaikan selamat kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atas penunjukannya sebagai Menteri Perdagangan yang baru.

Amin menilai, posisi sebagai Mendag sebetulnya kurang sesuai dengan rekam jejak Zulhas. Penunjukannya sebagai Mendag lebih karena faktor akomodasi politik daripada pertimbangan profesionalisme.

“Pemilihan menteri itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Kami sebagai mitra akan mendukung kebijakan yang baik dan berpihak pada rakyat. Sebaliknya kami akan mengkritisi kebijakan yang kami nilai tidak tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut Amin mengingatkan Mendag menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang krusial dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Pertama, sebut Amin, krisis minyak goreng yang belum

usai hingga saat ini. Harga minyak goreng curah sampai saat ini masih bertengger diangka Rp 18.100 per liter, jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah juga belum melaksanakan audit terhadap produsen CPO dan minyak goreng sebagai dasar perijinan ekspor. Kami minta hasilnya juga diumumkan secara terbuka,” tegasnya.

Persoalan kedua, stabilisasi stok dan harga bahan kebutuhan pokok yang saat ini melambung tinggi. Pemerintah tidak punya strategi yang mampu mengatasi persoalan stok dan harga pangan.

“Pengendalian pasokan dan permintaan bahan kebutuhan menjadi persoalan kronis yang terus berulang setiap tahun. Di musim panen harga pangan anjlok dan petani menangis. Sebaliknya diluar musim panen, konsumen dan pelaku usaha mikro menjerit karena harga pangan dan bahan baku usaha melonjak tinggi,” lanjutnya.

Semestinya, dengan kemajuan teknologi saat ini, dimana hasil pertanian bisa disimpan lebih lama, maka stabilitas stok bisa lebih terjaga. Ini memang bukan semata menjadi tupoksi Mendag.

Persoalan Ketiga, sistem distribusi dan tataniaga barang kebutuhan pokok yang sering kali di luar kendali pemerintah. Peran mafia pangan ataupun oligarki terasa makin kuat, seperti halnya pada kasus minyak goreng.

“Saya berharap mendag yang baru bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada,” pungkasnya.



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

“Pengendalian pasokan dan permintaan bahan kebutuhan menjadi persoalan kronis yang terus berulang setiap tahun. Di musim panen harga pangan anjlok dan petani menangis. Sebaliknya diluar musim panen, konsumen dan pelaku usaha mikro menjerit karena harga pangan dan bahan baku usaha melonjak tinggi,”

Rapat dengan Menteri Investasi, Nevi Zuairiana Pertanyakan Investasi untuk IKN

● KUTIPAN

Jakarta (14/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairiana mempertanyakan kondisi investasi terkini yang diperuntukan bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkannya terkait dengan beredar informasi adanya investor potensial yang undur diri dan mengurangi niat untuk ikut terlibat dalam mega proyek tersebut. Investasi pembangunan IKN sendiri menjadi salah satu yang ditawarkan Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF), di Davos, Swiss, 22-26 Mei 2022 lalu.

"Banyak informasi menyampaikan ada beberapa investor yang batal berinvestasi di IKN ini, untuk itu tolong sampaikan bagaimana potensi investasi IKN saat ini? Apa yang menyebabkan investasi IKN sepi pembeli? Seperti apa hasil

'jualan' pemerintah mengenai IKN sampai saat ini terutama ketika Pak Menteri kemarin pergi ke Davos," tanya Nevi dalam rapat Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Jumat (10/6).

Kepada Parlemen, legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II tersebut mengungkapkan keingintahuannya atas alasan mundurnya beberapa calon investor IKN. Terlebih hingga akhir rapat, belum ada jawaban resmi yang dilayangkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Kita juga harus mengetahui potensi dari investasi yang di-cancel apa aja gitu. Jadi, selain adanya pembatalan harus ada alasannya kenapa? Terus juga potensinya apa? Biar nanti kita juga bisa melihat peluangnya sebesar apa? Jadi apakah karena disana memang masih sepi ataukah karena infrastrukturnya belum ada? Nanti kita tanyakan lagi ke Pak Menteri," tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut usai rapat.

Selain terkait dengan update kondisi investasi di IKN, pada rapat pembahasan mengenai RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Investasi Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022 Kementerian Investasi/BKPM tersebut, Nevi juga menanggapi tambahan anggaran yang diajukan.

"Ada usulan anggaran Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sekitar 278 miliar, diantaranya kegiatannya Satgas Percepatan Realisasi Investasi. Apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Realisasi Investasi dan bagaimana koordinasi dengan lembaga lain dalam memperlancar proses investasi di Indonesia?" tanya Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

Pada rapat tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM memaparkan bahwa pagu indikatif instansi tersebut untuk



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Kita juga harus mengetahui potensi dari investasi yang di-cancel apa aja gitu. Jadi, selain adanya pembatalan harus ada alasannya kenapa? Terus juga potensinya apa? Biar nanti kita juga bisa melihat peluangnya sebesar apa? Jadi apakah karena disana memang masih sepi ataukah karena infrastrukturnya belum ada? Nanti kita tanyakan lagi ke Pak Menteri"

tahun 2023 sebesar Rp646.016.145.000, angka tersebut berada pada kisaran 50 persen dari total pagu 2022. Di depan seluruh anggota rapat, Bahlil mengajukan usulan

anggaran tambahan untuk tahun 2023 sebesar Rp1.240.593.724.000 sehingga total anggaran yang diajukan menjadi Rp1.240.593.724.000.

Ingatkan Kemendag RI, Politisi PKS: Pelatihan untuk UMKM **Harus Berhasil Guna**

KUTIPAN

Jakarta (23/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Aceh 1, Rafly atau yang biasa dipanggil Rafly Kande mengingatkan Kementerian Perdagangan RI agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelatihan bagi pelaku UMKM.

"Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Kemendag RI di daerah-daerah harus tertata dengan baik dan berkelanjutan", kata Rafly memulai usulan nya.

Rafly menyampaikan usulan tersebut pada acara Forum diskusi grup (FGD) yang dilaksanakan oleh Kemendag RI dengan mengundang anggota DPR RI dari Komisi VI pekan lalu 16 Juni 2022 di Jakarta.

Lebih lanjut Rafly mengatakan bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan di

lapangan bahwa program yang disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga dan Dirjen Perjanjian Perdagangan Internasional Djatmiko bahwa UMKM dapat melakukan pinjaman tanpa bunga adalah dongeng belaka.

"Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa UMKM tetap harus menyiapkan agunan untuk pinjaman yang akan diberikan. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa ada pinjaman tanpa agunan hanyalah dongeng belaka", lanjut Rafly.

Agar dikemudian hari

kegiatan pelatihan untuk UMKM yang dilakukan Kemendag RI lebih berhasil guna dan tepat sasaran, Rafly mengusulkan agar Kemendag RI bekerja sama dengan Anggota DPR RI dari dapil yang dilakukan pelatihan.

"Usulan saya, agar Kemendag bisa berkoordinasi dengan Anggota DPR RI dari dapil yang bersangkutan sebelum melakukan pelatihan. Agar pelatihan yang dilakukan lebih tertata dan berkelanjutan", timpal Rafly seraya menutup usulannya.



"UMKM tetap harus menyiapkan agunan untuk pinjaman yang akan diberikan. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa ada pinjaman tanpa agunan hanyalah dongeng belaka"



RAFLY

Anggota Komisi VI DPR RI

Aleg PKS: PLN Jangan Hanya Andalkan Kenaikan Tarif Listrik, Tapi Lakukan Efisiensi

KUTIPAN

Jakarta (14/06) — Untuk meringankan beban subsidi, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta PLN melakukan efisiensi besar-besaran sebelum menaikkan tarif dasar listrik (TDL). PLN juga didesak berani melakukan renegotiasi terhadap semua kontrak yang merugikan.

"PLN jangan hanya mengandalkan kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga untuk memperbaiki kinerja layanan dan keuangannya. Namun yang utama wajib untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi operasionalnya, sehingga biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN menurun. Kalau ini terjadi, maka bukan hanya PLN yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat pelanggan listrik," tegas Mulyanto. Mulyanto menambahkan langkah ini adalah hal strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas bagi bisnis PLN ke depan.

"Salah satu yang krusial

adalah penurunan surplus listrik PLN, khususnya di Jawa dan Sumatera. Dengan adanya klausul TOP (take or pay) alias 'pakai atau tidak pakai, bayar' dalam kontrak listrik, maka surplus daya listrik yang ada menjadi beban yang harus dibayar PLN," ujarnya.

Semakin besar surplus listrik tersebut, kata Mulyanto, maka semakin besar beban PLN.

"Ditambah lagi dengan mulai beroperasinya PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) baru hasil program 35 ribu MWe, maka praktis akan menambah angka surplus listrik dan menjadi semakin menghimpit PLN," terang

Mulyanto.

Karenanya, PLN harus berani mendesak pihak listrik swasta (Independent power producer) untuk mengerem bertambahnya surplus listrik dari PLTU baru.

"Hal lain yang perlu dilakukan PLN adalah efisiensi operasi PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). Walaupun dari segi jumlah daya, kontribusi PLTD tidak seberapa besar, namun perannya dalam BPP listrik PLN cukup signifikan," pungkasnya.

Apalagi ketika harga minyak dunia melonjak, beban dari PLTD ini ikut melonjak. Berbeda dengan PLTU, meskipun harga batubara dunia sedang tinggi, dengan berlakunya DMO (domestic market obligation), harga batubara untuk PLN dipatok tetap pada harga USD 70 per ton.

"Karenanya, di tengah harga migas yang tinggi, pembangkit disel ini harus segera dikonversi dengan listrik dari sumber EBT (energi baru terbarukan) dalam menekan BPP listrik PLN," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI ini



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"PLN jangan hanya mengandalkan kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga untuk memperbaiki kinerja layanan dan keuangannya. Namun yang utama wajib untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi operasionalnya, sehingga biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN menurun. Kalau ini terjadi, maka bukan hanya PLN yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat pelanggan listrik,"

Di samping itu, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kenaikan tarif untuk golongan bisnis dan industri tertentu. Kelompok pelanggan ini jangan dimanja. Meski jumlahnya

sedikit, justru kelompok pelanggan ini yang memberikan pendapatan dominan bagi PLN.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Wakil Ketua FPKS: Pembatasan Penggunaan BBM Bersubsidi **Jangan Sulitkan Rakyat**

KUTIPAN

Jakarta (16/06) — Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan BBM kepada semua mobil pribadi (plat hitam) serta kendaraan dinas. Kebijakan ini diambil agar subsidi BBM tahun 2023 lebih tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM dalam rangka penetapan Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN Tahun 2023 di Jakarta (14/06/2022).

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto secara umum memahami kebijakan Pemerintah terkait BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran tersebut.

Sebelumnya, Mulyanto mengusulkan pembatasan pengguna BBM bersubsidi tersebut diberlakukan hanya untuk mobil mewah dan mobil dinas.

Sikap Pemerintah, kata Mulyanto, dalam hal ini memang lebih tegas, yakni

pembatasan BBM bersubsidi untuk seluruh kendaraan perorangan (kecuali pic-up) serta untuk mobil dinas.

"Artinya seluruh mobil pribadi baik mewah maupun tidak mewah tetap masuk dalam negative list pembatasan BBM bersubsidi ini. Di lapangan pelaksanaannya tentu akan lebih mudah," ujar Mulyanto.

"Dalam implementasinya pembatasan BBM bersubsidi ini jangan sampai mempersulit rakyat kecil yang berhak untuk mengakses BBM ini," imbuhnya.

Dalam rapat pembahasan tersebut dirinya juga mengusulkan agar subsidi tetap Pemerintah pada tahun 2023 untuk JBT solar ini dinaikan dari Rp. 500 per liter menjadi Rp. 3.500 per

liter untuk menyesuaikan dengan kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang menyentuh angka \$100 per barrel.

Menurut Mulyanto hal ini penting, agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung ditimpakan pada masyarakat berupa kenaikan harga JBT solar, namun ditanggung Pemerintah yang bertindak sebagai shock absorber kenaikan harga-harga dunia.

"Terkait pembahasan besaran subsidi tetap solar ini, memang cukup alot. Namun dengan catatan, bahwa akan ada pembatasan bagi pengguna solar bersubsidi, akhirnya Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat pada angka subsidi tetap solar sebesar Rp. 3000 per liter (naik 6x lipat dari subsidi tetap solar yang sekarang sebesar Rp. 500 per liter)," terang Mulyanto.

Untuk diketahui Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM berhasil menyepakati Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN Tahun 2023 sebagai berikut : 1) ICP sebesar 90-110 USD/barrel, 2) volume solar bersubsidi 16.5 -



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Terkait pembahasan besaran subsidi tetap solar ini, memang cukup alot. Namun dengan catatan, bahwa akan ada pembatasan bagi pengguna solar bersubsidi, akhirnya Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat pada angka subsidi tetap solar sebesar Rp. 3000 per liter (naik 6x lipat dari subsidi tetap solar yang sekarang sebesar Rp. 500 per liter),"

17 juta kilo liter, 3) volume LPG 3 kilogram 8.00-8.50 juta MTon, 4) subsidi tetap minyak solar

(gas oil 48) Rp 3.000 per liter, dan 5) subsidi listrik sebesar Rp 69-72 triliun.

Wabah PMK Kembali Melanda Indonesia

PKS : Pemerintah Kebobolan dan Terlambat

- Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali muncul di Indonesia pada tahun 2022.



Kerugian akibat PMK
Rp9,9 Triliun

- Jumlah hewan ternak terinfeksi

240.944 ekor
per 24 Juni 2022.

- Menyerang hewan berkuku belah;



Sapi



Kerbau

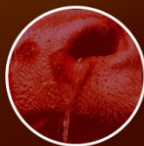


Kambing



Domba

- Masuknya PMK disinyalir akibat perubahan regulasi tentang hewan atau produk hewan impor, yang awalnya berbasis country base menjadi zone base.



Secara umum, terus terang, penanganan Pemerintah ini terlambat. Seharusnya apabila sudah diadikasi sejak awal, PMK tidak akan meluas. Namun, tidak dilakukan dengan cepat

drh. H. Slamet

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS

Tertunda 2 Tahun 776 Orang Calon Haji Kota Depok Lakukan Manasik Haji, Ini Pesan Nur Azizah Tamhid

KUTIPAN

Depok - Pemerintah Kota Depok melalui Kementerian Agamanya melakukan bimbingan manasik haji Tingkat Kota Depok pada Sabtu (4/6).

Calon jemaah haji asal Kota Depok terus mempersiapkan diri dengan Manasik Haji tingkat Kota yang diselenggarakan di Masjid Agung Balai Kota Depok. Sebanyak 776 jemaah Kota Depok berangkat tahun ini yang sempat tertunda selama dua tahun akibat mewabahnya pandemi Covid-19.

Pada kesempatan ini turut hadir pula Anggota DPR RI Komisi VIII, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. Ia menuturkan rasa bangganya dengan memberikan selamat kepada warga Depok. Sebab, pada tahun ini sebanyak 776 jemaah akan berangkat ke Tanah Suci, Makkah.

"Saya sangat senang kepada bapak dan ibu sekalian. Sebab, tahun ini akan melaksanakan rukun islam yang ke 5, saya sampaikan betul agar

niat ibadahnya dilakukan dengan sungguh-sungguh," ucap Nur Azizah.

Nur Azizah berpesan bagi yang sudah niat haji janganlah berkata keji, jangan pula berbuat fasiq dan jangan pula berbantah. "Sebaik-baiknya bekal haji adalah ketakwaan," ucapnya.

Nur Azizah menghimbau kepada para jemaah calon haji Kota Depok supaya jangan ragu untuk berbuat baik di Tanah Suci. "Berlomba-lomba dalam kebaikan dan ibadah di Tanah Suci, sebab semua pahala disana dilipat gandakan," pesannya.

Nur Azizah berharap semoga para jemaah yang berangkat haji tahun ini diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga pulang ke Tanah Air dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta dan

menjadi haji yang mabrur.

Selain itu, ia turut menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler tahun 1443H/2022M sebesar Rp 81.747.844,04. Dengan rincian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Rp 39.886.009, biaya protokol kesehatan Rp 808.618,8 dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang telah di Kelola oleh BPKH sebesar Rp. 41.053.216,24.

Nur Azizah menjelaskan, berdasarkan asumsi kuota haji 1443H/2022M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH adalah 110.500 jemaah atau 50% dari kuota haji 2019. Perinciannya reguler 101.660 dan haji khusus 8.840.

"Salah satu aspek yang berbeda tahun ini terkait dengan volume makan yang dinaikkan dari dua kali menjadi tiga kali per hari selama jemaah berada di Makkah maupun Madinah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Salah satu aspek yang berbeda tahun ini terkait dengan volume makan yang dinaikkan dari dua kali menjadi tiga kali per hari selama jemaah berada di Makkah maupun Madinah. Ini merupakan komitmen pemerintah dan DPR RI memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia yang harus rela tidak berhaji dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19",



RDP dengan BAZNAS RI, Aleg PKS Usulkan Amil Zakat agar Disertifikasi

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis meminta kepada Ketua Baznas Republik Indonesia agar amil zakat Baznas di seluruh daerah bisa disertifikasi.

"Amil Zakat ini saya minta kepada ketua Baznas Republik Indonesia agar secepatnya dapat disertifikasi, karena ini sangat penting untuk publik nantinya," ungkap Iskan.

Sistem yang ada saat ini, lanjut Iskan, diapresiasi telah semakin maju, oleh karena itu harus lebih ekstra dalam hal sertifikasi ke daerah-daerah.

"Salah satunya membangun suatu kepercayaan dari masyarakat kepada Baznas itu sendiri juga. Baznas saya nilai telah berhasil juga untuk menekan angka kemiskinan dan telah membantu khususnya di daerah agak terisolasi yaitu di pulau Nias. Di daerah yang masih terpencil ini bantuan untuk da' sangat dibutuhkan. saya berharap nantinya bantuan dai ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih

mempercayai baznas sebagai wadah tempat Badan Amil Zakat", ujar Iskan.

Anggota Legislatif asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa Baznas harus juga melakukan sosialisasi peran strategis baznas untuk bangun kepercayaan publik,

"Upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada Baznas itu harus di lakukan secara sistematis dengan melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat mau tentunya untuk mengeluarkan atau menyalurkan zakat, infak dan sedekah ke Baznas. Disini saya apresiasi juga kinerja dari Baznas yang mana telah berhasil menekan angka kemiskinan yang bisa ditekan sampai 10 persen dari target pemerintah yang anggarannya sekitar 200 triliun untuk

pengentasan kemiskinan, sekitar 26 triliun dana yang akan disalurkan oleh Baznas tentu sangat membantu Pemerintah," terang Iskan.

Baznas juga, kata Iskan, perlu sosialisasi peran strategisnya kepada masyarakat khususnya daerah-daerah yang masih belum paham tentang program Baznas.

"Dengan dilakukannya sosialisasi diharapkan nantinya masyarakat bisa untuk lebih mempercayai Baznas untuk zakat, infak dan sodaqoh", tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan kepada Ketua Baznas agar merevisi Undang-Undang tentang Zakat.

"Undang-Undang Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini saya harapkan kepada ketua Baznas agar dapat segera mungkin di revisi, pasalnya agar masyarakat bisa lebih tahu dan lebih memahami lagi tentang berzakat," ungkapnya.

Iskan menambahkan, tidak perlu memaksa publik untuk menunaikan zakat dengan keterpaksaan telah kita nilai juga itu tidak berhasil.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada Baznas itu harus di lakukan secara sistematis dengan melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat mau tentunya untuk mengeluarkan atau menyalurkan zakat, infak dan sedekah ke Baznas

"Lebih baik kita lakukan strategi yang matang agar masyarakat bisa berzakat di Baznas dengan lebih lega hatinya. Tujuan dengan direvisinya Undang-Undang tentang zakat ini saya harapkan juga bisa terus untuk

masyarakat mempercayai Baznas sebagai wadah atau tempat yang terbaik dalam menyalurkan Infak, Zakat dan Shodaqoh dari para warga masyarakat kita", pungkas Iskan mengakhiri.

Ratusan CPMI Gagal Berangkat, Wakil Ketua FPKS Desak BP2MI Agar Jangan Mempersulit

KUTIPAN

Jakarta (14/06) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) segera menyelesaikan masalah tertundanya keberangkatan 147 CPMI asal NTB ke Malaysia.

"Saya mendesak BP2MI agar segera menyelesaikan masalah ini. Proses keberangkatan mereka sesuai prosedur dan jangan mempersulit. Penundaan berlarut-larut pada akhirnya dapat merugikan CPMI yang ingin bekerja di luar negeri," kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (14/06).

Menurut Netty, status CPMI yang gagal berangkat tersebut saat ini tidak jelas.

"Mereka ini bisa diberangkatkan atau tidak? Jika tidak ada kejelasan seperti sekarang ini, tentu akan membuat mereka terlunta-lunta di tempat perusahaan penyalur," terangnya.

Apabila BP2MI tidak

segera menyelesaikan masalah ini, katanya, ia akan mengusulkan agar lembaga tersebut dipanggil kembali dalam rapat Komisi IX DPR RI.

"BP2MI mengatakan kalau penundaan ini terjadi karena dokumen CPMI tidak lengkap, termasuk soal visa kerja. Sementara APPMI mengatakan kalau dokumen mereka sudah lengkap. Visa kerja dengan rekomendasi pun dapat diurus jika telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh otoritas di sana," ujarnya

Oleh karena itu, lanjut Netty, silang pendapat dan informasi ini harus diklarifikasi kepada dua belah pihak dengan tujuan memudahkan CPMI berangkat bekerja.

Terakhir Netty berharap masalah ini bisa segera selesai. "Masalah ini bukan hanya masalah internal kita, tapi juga dapat mempengaruhi hubungan dengan Malaysia. Bagi CPMI yang sudah memenuhi syarat sesuai aturan dan perundang-undangan hendaknya BP2MI membantu dan memudahkan pemberangkatan mereka, jangan dipersulit" kata Netty.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Saya mendesak BP2MI agar segera menyelesaikan masalah ini. Proses keberangkatan mereka sesuai prosedur dan jangan mempersulit. Penundaan berlarut-larut pada akhirnya dapat merugikan CPMI yang ingin bekerja di luar negeri,"

Ratusan Ribu Tenaga Honorer Terancam Jadi Pengangguran, Aleg PKS Minta **Siapkan Solusi** Sejak Dini

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer di lingkup kerja birokrasi berlaku pada November 2023. Penghapusan tenaga honorer ini jika tidak dicarikan solusi akan menambah angka pengangguran dalam jumlah besar.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan jika tidak segera dicarikan solusi, ratusan ribu tenaga honorer akan menambah angka pengangguran terbuka dan pasti berdampak pada aktivitas ekonomi nasional.

Menurut data Kementerian PAN RB, per Juni 2021 ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak

ada solusi dari pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tidak adanya lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi salah satu penyebab pengangguran masih cukup tinggi di Februari 2022.

Angka pengangguran per Februari 2022 tercatat 8,4 juta orang. Salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran, serapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintah yang turun sebanyak 30 ribu orang selama periode Februari 2021-Februari 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tidak ada

lowongan CPNS dari pemerintah ikut mendorong meningkatnya angka pengangguran

"Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka. Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (17/06).

Kurniasih mengatakan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian termasuk antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi.

"Kita minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"BPS menyebut tidak ada lowongan CPNS dari pemerintah ikut mendorong meningkatnya angka pengangguran. Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka"

untuk teman-teman tenaga honorer ini," kata dia.

Sejauh ini baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidikan. Sementara tenaga honorer lainnya seperti di bida-

ng kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO

Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



**Saksikan
Setiap Jum'at**
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB

Aleg PKS Ingatkan Pemerintah agar Hati-hati Keluarkan Wacana Cukai Ban Karet, BBM, dan Deterjen

KUTIPAN

Jakarta (16/06) — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji tiga jenis barang yang akan dikenakan cukai, diantaranya ban karet, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan deterjen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pihaknya sedang mengkaji tiga jenis barang yang akan dikenakan cukai, diantaranya ban karet, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan deterjen dalam konteks untuk pengendalian konsumsi.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengatakan cukai ini memang sifatnya selektif dan diskriminatif yang artinya tidak semua barang bisa

dikenakan cukai. Sehingga hanya barang yang memenuhi beberapa ciri atau karakteristik tertentu yang dapat dikenakan cukai.

"Bisa karena konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan," kata Anis.

"Salah satu yang saya garis bawahi adalah jangan sampai cukai dikenakan karena semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara,"

imbuhnya.

Anis menekankan bahwa memang dampak terhadap lingkungan hidup juga harus dipikirkan, tetapi tentu dengan berbagai pertimbangan analisis dampak, risiko, dan solusi yang tepat. Perlu dicatat bahwa cukai ini bukanlah aspek pokok untuk menggenjot penerimaan negara.

"Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengeluarkan berbagai wacana yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk terkait beberapa barang yang akan dikenakan cukai," ujarnya.

Pasalnya tambah Anis, masyarakat masih resah dengan naiknya berbagai macam kebutuhan bahan pokok, PPN, BBM, isu kenaikan listrik.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan yang dekat dengan kaum ibu ini menyampaikan keresahan kelompok ibu rumah tangga mendengar isu deterjen yang akan menjadi objek cukai.

"Bisa dibayangkan sekarang ini ibu-ibu makin panik dengan wacana 'deterjen' akan menjadi objek cukai baru. Dan kepanikan mereka sangat wajar karena pasti akan berdampak pada kenaikan harga deterjen yang sudah menjadi bahan kebutuhan pokok rumah tangga," pungkas Anis mengakhiri.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Wakil Ketua BAKN DPR RI

"Bisa dibayangkan sekarang ini ibu-ibu makin panik dengan wacana 'deterjen' akan menjadi objek cukai baru. Dan kepanikan mereka sangat wajar karena pasti akan berdampak pada kenaikan harga deterjen yang sudah menjadi bahan kebutuhan pokok rumah tangga,"

Bahas Revisi UU Pengelolaan Sampah, Adang Daradjatun: Penegakan Peraturan Jadi yang Utama

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Adang Daradjatun menyebutkan pentingnya disertakan teknologi dan penegakan peraturan yang jelas dalam muatan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut tinjauan Anggota Komisi III DPR RI tersebut, dalam UU Pengelolaan Sampah saat ini terdapat kesulitan untuk menajutahkan hukuman pada yang melanggar.

“Di UU ini juga menarik, ada pidanya tapi dalam ketentuan umunya Si Pengelola ini siapa, tidak dinyatakan secara tegas, jadi sulit untuk menegakan hukumnya,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam rapat pleno UU Pengelolaan Sampah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Selain muatan hukum, Adang juga menjelaskan

pentingnya peran teknologi dalam mendukung kesuksesan dalam pengelolaan sampah era modern ini.

“Ini kan minimal perlu ada perubahan mindset, ini mau penegakan hukum atau mau langsung lompat gitu, lompat terhadap yang sering bapak lihat di luar negeri, lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi,” jelasnya.

Namun Adang juga mengingatkan, jika penerapan teknologi ini di lakukan harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, DPR, juga pemerintah daerah dalam hal implementasi.

“Berapa kali swasta di sini

mau masuk dan di DKI Jakarta juga terjadi. Sudah mesinnya juga enggak beres, terus tidak selesai. Nah itu kan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah,” tambah legislator dari DKI Jakarta III itu.

Dalam hal ini jika nantinya pemerintah akan menjalin kerja sama dengan swasta, menurut Adang mindset dan pengawasan serta panduan dari pemerintah pusat adalah yang paling utama.

“Ini sulit untuk dibicarakan dalam konteks UU, karena ini pemikiran di lapangan lalu kita ingin sampaikan di UU. Tapi mungkin para tenaga ahli nanti bisa menangkap pola pikir ini dan saya sependapat juga bahwa bagaimanapun juga penegakan peraturan persampahan kalau memang ini mau dilanjutkan undang-undang baru itu menjadi utama. Tapi kalau untuk saya secara pribadi saya lebih mau loncat langsung ke teknologi,” tutup Adang.



Drs. H. ADANG DARADJATUN
Anggota Badan Legislatif DPR RI

“Jika nantinya pemerintah akan menjalin kerja sama dengan swasta, menurut Adang mindset dan pengawasan serta panduan dari pemerintah pusat adalah yang paling utama”

Bersama BRIN, Rofik Adakan Bimtek Pengemasan Produk UMKM di Purbalingga

KUTIPAN

Purbalingga (13/06) — Salah satu cara untuk meningkatkan bisnis adalah kemasan (packaging) produk. Karena itu pelaku UMKM harus memberikan perhatian pada kemasan produk mereka.

"Para pelaku UMKM meski di desa, tetap harus concern juga dengan kemasan produk. Karena sekarang ini desa tidak bisa sepenuhnya dikatakan desa. Sebab desa sudah terpapar teknologi sehingga kehidupannya sudah seperti orang kota," kata Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto.

Dia mengatakan hal itu saat membuka Bimbingan Teknis Pengemasan Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga di Hotel Braling, Jum'at (10/6). Kegiatan yang diikuti 100 pelaku UMKM merupakan kerjasama BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dengan Komisi VII DPR RI.

"Orang mau jualan apa saja bisa dari desa. Tinggal produknya bisa diterima pasar

atau tidak. Salah satunya dengan packaging yang bagus. Produk yang awalnya terlihat kurang menarik, menjadi menarik dan memiliki nilai jual lebih. Yang semula untungnya sedikit, menjadi banyak. Salah satunya karena kemasan," katanya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS itu menambahkan, kerudung yang harganya tidak mahal, kalau dengan kemasan yang bagus harga jualnya bisa menjadi mahal. Karenanya yang namanya kemasan produk itu penting.

"Kami sangat mendukung bagaimana konsep Rumah Kemasan Bersama yang digagas BRIN bisa ada di sini. Kami akan bicarakan lebih lanjut nanti," kata Legislator

dari Dapil Jawa Tengah 7 itu.

Kepada para peserta, Rofik Hananto meminta mereka mengikuti bimtek itu dengan sebaik-baiknya. Dia minta peserta memanfaatkan keberadaan BRIN di Purbalingga. Sebab BRIN berbakti untuk negeri.

"Saya sangat mendukung semua program BRIN. Kami akan optimalkan semua program dengan sebaik-baiknya," katanya.

Direktur Pemanfaatan Riset & Inovasi Pada Kementerian/Lembaga, Masyarakat dan UMKM, BRIN, Dadan Nugraha, S.Si, MT mengatakan, BRIN mempunyai tugas dan komitmen bagaimana memanfaatkan hasil riset tidak berhenti menjadi jurnal atau hanya disimpan di laboratorium.

"Tetapi bagaimana hasil riset itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik masyarakat industri maupun pelaku UMKM. Produk UMKM itu sangat potensial untuk dikembangkan dengan sentuhan hasil riset," katanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Orang mau jualan apa saja bisa dari desa. Tinggal produknya bisa diterima pasar atau tidak. Salah satunya dengan packaging yang bagus. Produk yang awalnya terlihat kurang menarik, menjadi menarik dan memiliki nilai jual lebih. Yang semula untungnya sedikit, menjadi banyak. Salah satunya karena kemasan"



Kunjungan Dapil, Nur Azizah **Hadiri Halal** **Bi Halal** Bersama Majelis Taklim se-Kota Depok

KUTIPAN

Depok (16/06) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, melaksanakan Halal Bi Halal dan Kunjungan Dapil DPR RI Masa Persidangan V Tahun 2021-2022 di Rumah Makan Gandy, Sawangan Depok, Jum'at (03/06).

Acara tersebut mengusung tema 'Dengan Halal Bi Halal Mempererat Silaturahmi dan Semangat Dalam Berkontribusi Untuk Negara' dengan turut mengundang Pengurus Majelis Taklim se-Kota Depok.

Dalam penyampaian materi, Nur Azizah menjelaskan mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI.

"Saya itu di komisi VIII DPR RI mitra kerjanya meliputi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, KemenPPA, BAZNAS RI, dan BPKH, dan beberapa mitra kerja lainnya" ujarnya.

Lebih lanjut, Nur Azizah mengatakan, BPKH sendiri

sangat membantu dalam pengelolaan dana yang disetor oleh Jamaah Haji.

"BPKH sendiri merupakan mitra yang sangat membantu jamaah haji. Karena dana yang di setor jamaah haji itu dikelola oleh BPKH," tambahnya.

Tidak hanya soal BPKH, Nur Azizah juga menyampaikan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 12 April 2022 lalu. Lebih lanjut, ia dan FPKS tidak menyetujui saat berlangsung rapat Paripurna.

"FPKS tidak menyetujui saat paripurna persetujuan RUU

TPKS tersebut, karena masih ada unsur hubungan suka sama suka dan LGBT tidak dianggap pidana," tuturnya.

Diakhir, Nur Azizah menghimbau kepada peserta agar tidak lalai dalam berkegiatan ataupun kehidupan sehari-hari karena Pandemi Covid 19 telah berkurang.

"Saya menghimbau agar kegiatan ataupun kehidupan sehari-hari agar tidak lalai dan terlena meskipun pandemi covid 19 telah landai dan berkurang. Dan jangan sampai bergejolak juga kegiatan-kegiatan yang berupa kemakhsian," pungkasnya.

Acara tersebut ditutup dengan doa dan foto bersama. Turut hadir Walikota Depok Periode 2006-2016, Nur Mahmudi Isma'il.



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Saya itu di komisi VIII DPR RI mitra kerjanya meliputi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, KemenPPA, BAZNAS RI, dan BPKH, dan beberapa mitra kerja lainnya" BPKH sendiri sangat membantu dalam pengelolaan dana yang disetor oleh Jamaah Haji.



Sambutan Pelatihan di Dapil, Anis: Penting Pahami Penyembelihan Kurban sesuai Syariat

KUTIPAN

Jakarta (21/06) — Menjelang persiapan Idul Adha 1443H, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur, Anis Byarwati menghadiri acara Edukasi dan Pelatihan Sembelih Halal

yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Mahatma bekerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Juru Sembelih Halal (JULEHA) Jakarta Timur, di Pondok Ranggan, Cipayung, Jakarta Timur (19/06/2022).

Dalam sambutannya, di hadapan 100 peserta dan panitia yang merupakan para pengurus masjid dan mushola se kecamatan Pondok Ranggan, Anis menjelaskan pentingnya para JULEHA memahami alasan menyembelih hewan secara Syariat Islam dari sisi ilmiah, yang dikutip melalui sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dua staf ahli peternakan di Hannover University, Jerman. Penelitian tersebut

dilakukan untuk menjawab pertanyaan: manakah yang lebih baik dan paling tidak sakit, menyembelih secara Syariat Islam yang murni (tanpa proses pemingsanan) ataupun penyembelihan dengan cara Barat (dengan pemingsanan)?

Dalam Syariat Islam, penyembelihan dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam, dengan memotong tiga saluran pada leher bagian depan, yakni: saluran makanan, saluran nafas serta dua saluran pembuluh darah, yaitu: arteri karotis dan vena jugularis. Sedangkan pada Metode Barat muslimin memahami syariat menyembelih hewan qurban, tidak hanya dari sisi fiqh, namun juga secara ilmiah.

Dalam kesempatan yang sama, Anis yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR RI, secara detail menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ilmiah tersebut membuktikan penyembelihan secara syariat Islam ternyata lebih 'berperikehewanan'. Apalagi ditambah dengan anjuran untuk menajamkan pisau agar hewan sembelihan tidak merasa sakit. Anis mengatakan dari hasil penelitian.

"Pisau tajam yang mengiris leher, ternyata tidaklah 'menyentuh' saraf rasa sakit. Meronta-ronta dan meregangkan otot pada saat ternak disembelih ternyata bukanlah ekspresi rasa sakit! Melainkan hanya sebagai ekspresi 'kejutan otot dan saraf' saja, yaitu pada saat darah mengalir keluar dengan deras", jelasnya.

Lebih lanjut Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan itu juga menyampaikan kembali pentingnya kaum muslimin memahami syariat menyembelih hewan qurban, tidak hanya dari sisi fiqh, namun juga secara ilmiah.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Kewajiban menyembelih dengan syariat Islam termasuk dari ibadah, maka semoga kontribusi saya dalam acara ini, walaupun saya tidak ikut menjadi penyembelih, termasuk ibadah dan menjadi amal sholeh untuk saya yang diterima Allah SWT dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan",

"Tentu ini juga merupakan suatu hal penting untuk kita sebagai muslim, memahami syariatnya, tidak hanya secara fiqh namun juga secara ilmiah, agar kita dapat menyembelih secara tepat dan benar! Serta bukan hanya itu saja, kita juga

bisa memahami dengan benar, bahwa hewan yang disembelih tersebut tidaklah merasa kesakitan, sebagaimana diungkapkan alasannya dalam penelitian ilmiah tadi", tutur Anis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Tak Lelah Kundupil Hingga Pelosok, Kali Ini Aus Hidayat Nur Kunjungi Loa Janan

KUTIPAN

Kabupaten Kutai Kertanegara (21/06) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur kembali ke daerah pemilihan untuk bersilaturahmi dengan konstituennya, Sabtu, (11/06/2022).

Kali ini yang dituju adalah Desa Purwajaya, kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di kediaman Ibu Rohmat, rombongan Anggota Fraksi PKS DPR RI tersebut diterima.

Untuk mencapai Loa Janan di Kutai Kartanegara, Aus Hidayat Nur harus menempuh perjalanan lebih dari 1 jam dari kota Samarinda. Dengan kondisi jalan yang kurang bagus, sehingga kendaraan tidak bisa terus melaju. Mengunjungi desa-desa seperti ini menjadi komitmen Aus Hidayat Nur sejak menjadi Anggota DPR RI. Meskipun karena luasnya wilayah Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur harus mempergilirkan

kunjungannya dari satu desa ke desa lainnya secara bergantian.

Kundupil kali ini ditemani oleh Bapak Amit selaku sesepuh Tokoh Sunda di Loa Janan dan Ibu Mardiyana selaku Ketua RT 06. Aus Hidayat Nur menyampaikan bahwa Kundupil merupakan kegiatan Anggota DPR RI untuk mengetahui kondisi daerah pemilihannya.

"Misalnya, terkait kondisi ekonomi, apakah ada kenaikan harga-harga atau tidak? Juga kondisi-kondisi sosial lainnya," jelasnya.

Kyai Aus, begitu sapaan akrabnya, juga menjelaskan visi partainya.

"PKS sebagai partai Islam memiliki visi menjadi rahmatan lil alamin, jadi kita di PKS harus

bisa menjadi rahmat bagi sekitarnya, baik dengan melayani lingkungannya maupun menjadi solusi bagi sekitarnya," ungkapnya.

Aus Hidayat Nur juga menjelaskan tentang sosok Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri yang saat ini menjadi Ketua Majelis Syuro PKS.

"Beliau termasuk keturunan Rasulullah. Pernah menjadi Menteri Sosial yang gemar ke pelosok daerah Indonesia, juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman. Beliau juga merupakan cucu tokoh pejuang nasional Sis Al Jufri atau Guru Tua di Sulawesi Tengah," paparnya.

Silaturahmi yang dimulai sejak Maghrib itu ditutup dengan tausiyah.

"Sebentar lagi kita akan Idul Adha, dalam Idul Adha ini kita disyariatkan untuk berqurban. Daging qurbannya kemudian kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Inilah di antara wujud rahmatan lil alamin," pesan Aus Hidayat Nur dalam tausiyahnya.



KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Beliau termasuk keturunan Rasulullah. Pernah menjadi Menteri Sosial yang gemar ke pelosok daerah Indonesia, juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman. Beliau juga merupakan cucu tokoh pejuang nasional Sis Al Jufri atau Guru Tua di Sulawesi Tengah,"



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Junaidi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lampung

KUTIPAN

Lampung (22/06) --- Gejolak perekonomian di dunia kini tengah jadi sorotan khususnya yang sedang terjadi di Tiongkok dan Amerika Serikat. Sebab, hal itu akan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly menyampaikan bahwa gejolak ekonomi global yang terus meningkat berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia termasuk Lampung.

"Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Lampung perlu mengantisipasi gejala tersebut khususnya pada dampak kenaikan inflasi," hal ini disampaikan Junaidi dalam seminar diseminasi laporan perekonomian Provinsi Lampung, Selasa (21/06/2022).

"Koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah harus semakin dikuatkan bukan hanya pada persoalan inflasi tetapi juga pada penguatan ekonomi pasca covid-19," kata Junaidi.

Anggota legislatif Dapil Lampung II ini menambahkan,

Pertumbuhan ekonomi Lampung yang menurun pada triwulan I-22 harus dipacu kembali agar angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan lebih cepat.

"Sektor pertanian memiliki peranan penting bagi ekonomi Lampung baik pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pada sektor tersebut harus semakin besar. Misalnya pada kredit maupun dukungan ketersediaan saprodi," ujar Junaidi.

"LDR Lampung pada April 2022 mencapai 105 persen yang bermakna bahwa ekonomi daerah membutuhkan aliran likuiditas yang lebih besar untuk mendukung pemulihan ekonomi," tutup Junaidi.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

"Sektor pertanian memiliki peranan penting bagi ekonomi Lampung baik pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pada sektor tersebut harus semakin besar. Misalnya pada kredit maupun dukungan ketersediaan saprodi,"

Berada di Dapil, Diah Nurwitasari Resmikan Rumah Aspirasi

KUTIPAN

Kab. Bandung Barat (15/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Diah Nurwitasari meresmikan Rumah Aspirasi yang ditempatkan di kantor DPD PKS Kabupaten Bandung. Sebelumnya pada pekan yang sama Diah pun meresmikan Rumah Aspirasi di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam sambutannya Diah Nurwitasari mengungkapkan alasan dibuatnya Rumah Aspirasi.

"Kami meluncurkan program rumah aspirasi ini dengan harapan, agar fungsi saya sebagai Anggota DPR-RI untuk menyerap aspirasi dari konstituen dan untuk mengadvokasi bisa berjalan lebih optimal," ungkapnya.

"Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban saya kepada konstituen yang telah memilih PKS di daerah pemilihan, "Sambung politisi PKS yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Barat 2 yang meliputi Kabupaten Bandung dan KBB.

Rumah aspirasi ini akan difungsikan sebagai pusat advokasi dan informasi kegiatan Diah Nurwitasari.

"Rumah aspirasi ini kami beri slogan Mendengarkan dan Menyuarakan, ini sejalan dengan tagline PKS Bersama Masyarakat. Harapannya mampu menjadi sarana advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layanan PKS, juga menjadi salahsatu sarana untuk menyampaikan informasi kerja dan kinerja saya sebagai anggota DPR-RI." perempuan yang akrab disapa Teh Diah ini melanjutkan.

"Saya sengaja menyewa

ruangan di kantor DPD PKS Kabupaten Bandung juga di DPD PKS Bandung Barat sebagai Rumah Aspirasi agar masyarakat umum dan juga anggota PKS mudah mencarinya karena nahgiji dengan kantor PKS sehingga lebih mudah mengakses sekaligus mengenali," ujar Diah menambahkan.

Diah menambahkan rumah aspirasi ini nantinya akan ditugaskan salah seorang staf sebagai tenaga administrasi.

"Insya Allah setiap hari akan ada staf yang bertugas menerima tamu juga mencatat setiap masukan dan aspirasi dari masyarakat yang berkunjung ke rumah aspirasi ini, bahkan di setiap masa reses secara khusus saya akan mengalokasikan waktu untuk menerima konstituen secara langsung di ruangan ini," ucap Diah yang disambut tepuk tangan para tokoh undangan yang hadir di acara peresmian itu.

Hadir dalam acara tersebut beberapa tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung, salah satu di antaranya adalah Sekretaris Umum DPD PKS, Hadian Febrianto.

"Alhamdulillah di kantor DPD PKS Kabupaten Bandung ini sekarang memiliki Rumah Aspirasi dari Bu Diah Nurwitasari. Bagi kami ini merupakan kebahagiaan sekaligus kebanggaan yang mampu menguatkan citra PKS sebagai partai yang terdapan



Dipl.Ing. Hj. **DAIH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Rumah aspirasi ini kami beri slogan Mendengarkan dan Menyuarakan, ini sejalan dengan tagline PKS Bersama Masyarakat. Harapannya mampu menjadi sarana advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layanan PKS, juga menjadi salahsatu sarana untuk menyampaikan informasi kerja dan kinerja saya sebagai anggota DPR-RI"

melayani rakyat serta terbuka untuk berkolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat untuk membangun Indonesia khususnya Kabupaten Bandung

ini," ucap Hadian yang menerima potongan nasi tumpeng dari Diah Nurwitasari sebagai simbol peresmian rumah aspirasi ini.

Kunjungan ke Dapil, Anis Byarwati Didaulat Jadi Bunda UMKM Jakarta Timur

KUTIPAN

Jakarta (14/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur, Anis Byarwati, hadir dalam beberapa acara yang diadakan kelompok masyarakat dan struktur PKS di Jakarta Timur.

Diantara kegiatan yang dihadiri Anis adalah Lesehan bersama komunitas UMKM Jakarta Timur yang diadakan bekerjasama dengan Bidang Pembinaan Jaringan Konomi (BPJE) PKS Jakarta Timur, silaturahmi dengan komunitas penggiat ekonomi professional, Halal bi Halal dan bazaar UMKM DPC PKS Duren Sawit, Halal bi Halal DPC PKS Kramat Jati, dan silaturahmi dengan tokoh dan para ketua RT di wilayah Rw.03 Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati.

Pada acara lesehan bersama komunitas UMKM Jakarta Timur yang mengangkat tema utama 'UMKM Tumbuh Menjadi Tangguh dan Berdaya', pembina Dewan UMKM DKI Jakarta ini menyampaikan bahwa peningkatan UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan

ekonomi di Indonesia.

"UMKM menjadi salah satu sarana pembinaan masyarakat agar bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Jika ekonomi masyarakat meningkat, pendapatan negara pun meningkat. Maka Indonesia dapat memiliki ekonomi yang kuat", paparnya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini berpesan untuk para penggiat UMKM agar selalu memiliki semangat untuk tumbuh dan berkembang serta membuka diri untuk mau terlibat dalam pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh PKS.

"Saya yakin bersama PKS, UMKM akan bangkit, tumbuh, dan berdaya. Melalui UMKM, kita bersama-sama akan menguatkan ekonomi masyarakat dan siap memenangkan PKS di

tahun 2024", ujarnya.

Anis pun mengapresiasi penyelenggaraan acara ini, yang menjadi sarana para penggiat UMKM untuk terus maju dan berkembang bersama PKS.

Pada acara yang dihadiri oleh sejumlah pengurus inti DPD PKS Jakarta Timur ini, Anis didaulat menjadi Bunda UMKM Jakarta Timur. Penghargaan diberikan langsung oleh H. Tajuddin selaku ketua BPJE DPD Jakarta Timur beserta para perwakilan ketua-ketua kelompok UMKM yang hadir.

"Penghargaan ini didasari atas perhatian, perjuangan dan advokasi yang dilakukan Ibu Anis sebagai anggota dewan terhadap kepentingan dan kemajuan para pelaku UMKM di Jakarta Timur," kata Tajudin dalam sambutan yang disampaikan.

Sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, tercatat 1000 lebih unit usaha UMKM mendapatkan bantuan barang produksi dan penunjang usaha atas advokasi yang dilakukan Anis.

Selain Ketua BPJE PKS Jakarta Timur, H. Tajuddin, turut hadir dalam acara ini, Sekretaris DPD PKS Jakarta Timur, Tedy Ramadanus, Ketua



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS

"UMKM menjadi salah satu sarana pembinaan masyarakat agar bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Jika ekonomi masyarakat meningkat, pendapatan negara pun meningkat. Maka Indonesia dapat memiliki ekonomi yang kuat",

DPK PKS Pasar Rebo Samsul Bahri, beserta para anggota PKS lainnya.

Para peserta yang hadir sangat antusias menyampaikan apresiasi dan harapan kepada Anis agar bisa terus mendampingi UMKM Jakarta Timur untuk

lebih maju lagi.

Mereka pun menyampaikan berbagai usulan dan masukan untuk berkolaborasi bersama PKS untuk menghadirkan UMKM Jakarta Timur yang tangguh dan berdaya.

Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani Hortikultura,

Andi Akmal Harap Ada Peningkatan Produksi

KUTIPAN

Kabupaten Maros (14/06) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, bersama Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melaksanakan bimtek Hortikultura bagi petani dan pelaku usaha hortikultura di Maros, Sulawesi Selatan.

Bimtek ini selain dihadiri langsung oleh pihak Direktorat kementan, juga hadir Bupati Maros Chaidir Syam beserta jajarannya termasuk Kadis Pertanian.

"Saya merasa bangga pada pelaksanaan BIMTEK Hortikultura di Kabupaten Maros ini, disebabkan oleh bapak Bupati dan seluruh jajarannya melihat dan memantau langsung upaya peningkatan kapasitas SDM bidang pertanian. Ini merupakan awal yang baik sehingga di masa yang akan datang, akan terjadi kolaborasi positif antara pemerintah

daerah dan pemerintah pusat dengan para petani di Maros untuk peningkatan kapasitas produksi pertanian demi mewujudkan kemandirian pangan, minimal di daerah Sulawesi Selatan", urai Akmal dalam mengawali sambutannya.

Masyarakat Kabupaten Maros terhadap Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai PKS, Andi Akmal Pasluddin ini banyak merasakan kinerja dan kehadirannya dengan banyak program dan bantuan.

"Kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) bagi petani di Kabupaten Maros ini saling menjadi ajang peningkatan ilmu

dan pengetahuan karena banyak mendapat arahan, juga sebagai sarana evaluasi dan menyerap aspirasi segala kekurangan yang akan diperbaiki di kemudian hari," ungkapnya.

Andi Akmal sebagai Politisi PKS ini mengatakan, bahwa Bimtek ini banyak kemanfaatan untuk kemajuan pertanian di masa depan. Dengan potensi Sumber Daya Alam yang baik di negeri Indonesia, masih banyak ketidak efisienan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas sehingga yang semestinya negara mampu menghadirkan ketersediaan komoditas pangan dalam negeri, tetapi pada kenyataannya malah impor.

Untuk itu, lanjut Akmal, Bimtek ini sebagai ajang silaturahmi yang efektif untuk bertemu perwakilan petani se Kabupaten Maros, kemudian Mendorong Aspirasi Di kabupaten Maros, terutama bidang pertanian termasuk Hortikultura.

"Setelah Melihat Dukungan Pemerintah Daerah Kab Maros Terhadap Peningkatan, Pengembangan Sumber Daya Petaninya, kita semua mesti yakin untuk mengupayakan peningkatan produksi pertanian yang juga didukung oleh Pusat. Harapan terbesar nantinya bisa meningkatkan hasil produksi para pelaku/petani Hortikultura di kabupaten Maros", urai Akmal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) bagi petani di Kabupaten Maros ini saling menjadi ajang peningkatan ilmu dan pengetahuan karena banyak mendapat arahan, juga sebagai sarana evaluasi dan menyerap aspirasi segala kekurangan yang akan diperbaiki di kemudian hari,"



Bertemu Konstituen, Syaikh **Tegaskan** Empat Pilar Kebangsaan Modal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

KUTIPAN

Kabupaten Bekasi (13/06) — Anggota DPR dari Fraksi PKS Ahmad Syaikh menggelar agenda Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan konstituennya di Kabupaten Bekasi, Rabu (01/06/2022).

Dalam pemaparannya, Syaikh mengatakan pentingnya memahami 4 Pilar MPR RI.

"Kita sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di bumi Indonesia wajib memahami makna 4 Pilar MPR. Sebab ini sebagai modal untuk bergaul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar Syaikh.

Syaikh juga menambahkan, pentingnya memahami Empat Pilar MPR RI. Tujuannya agar semakin bijak dalam menyikapi perbedaan, lebih percaya diri dan taat pada konstitusi.

"Memahami 4 Pilar MPR RI

akan membuat kita percaya diri, bijak dan taat pada aturan konstitusi," tegas Syaikh lagi.

Warga Negara Indonesia yang paham 4 Pilar MPR RI, tambah Syaikh, pasti akan bersikap dan berperilaku yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tidak akan mengadu domba, memecah-belah, menista agama dan simbol agama, serta tindakan negatif lainnya yang dapat merusak persatuan bangsa

"Sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai 4 Pilar MPR RI pastinya tidak

akan dilakukan jika sudah memahami," jelas Syaikh.

Untuk itu, Syaikh mengajak peserta dan masyarakat lainnya untuk mengamalkan 4 Pilar MPR RI.

"Ayo kita mengamalkan Pancasila dan UUD 45, mempertahankan NKRI dan menjaga asas Bhinneka Tunggal Ika," pungkas Syaikh di depan 100 tokoh masyarakat yang hadir.



H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

“Warga Negara Indonesia yang paham 4 Pilar MPR RI, pasti akan bersikap dan berperilaku yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tidak akan mengadu domba, memecah-belah, menista agama dan simbol agama, serta tindakan negatif lainnya yang dapat merusak persatuan bangsa

Kuatkan Diplomasi Parlemen, HNW Terima Kunjungan Mufti Rusia

KUTIPAN

Jakarta (16/06) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan Ketua Majelis Spiritual Muslim (Mufti) Rusia Albir Krganov beserta delegasinya.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III lantai 9 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (15/06/2022). Ikut hadir pada pertemuan tersebut Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva.

Baik Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid maupun Head of the Spiritual Assembly of Muslim of Russia, membahas peran diplomasi untuk peningkatan hubungan antara kedua negara. Juga hubungan antara umat Islam, negara. Dibahas juga perkembangan demokrasi baik di Indonesia maupun Rusia.

Pada kesempatan itu Albir Krganov mengingatkan kembali hubungan erat antara Indonesia dan Rusia yang sudah berlangsung sejak lama, bahkan

sejak Rusia masih bernama Uni Soviet.

"Saat itu Presiden Indonesia pertama Ir. Soekarno sempat mengunjungi Uni Soviet. Waktu itu Bung Karno menemukan dan melaksanakan salat di Masjid Saint Petersburg, salah satu rumah ibadah umat Islam terbesar dan terindah yang ada di Rusia," ungkap Albir.

Peristiwa tersebut menurut Albir Krganov membuat hubungan Indonesia dengan Rusia sangat erat. Bahkan, umat Islam Rusia sangat menghormati Indonesia. Mereka selalu mengelu-elukan bangsa Indonesia, dan menganggapnya sebagai saudara.

Di Rusia, kata Albir Krganov saat ini terdapat lebih dari 20 juta penduduk beragama Islam, 8000 masjid, 150 pesantren/madrasah dan

lembaga Pendidikan menengah Islam serta 20 perguruan tinggi Islam. Dan disetiap masjid didirikan sekolah untuk anak-anak. Sehingga struktur Pendidikan Islam di Rusia sudah terhubung antara Pendidikan Islam terendah hingga tertinggi.

"Kami di Rusia juga memiliki UU yang membahas soal-soal agama hingga ribuan jumlahnya. Di Rusia, orang dilarang menghina umat beragama. Di Rusia juga ada larangan menghina kitab suci agama. Selain itu hubungan antar umat beragama di Rusia sangat baik. Bahkan Presiden Putin, sekalipun seorang non muslim tapi menghormati Umat Islam dan sering membaca dan menuliskan Al Quran," kata Albir Krganov menambahkan.

Albir Krganov berharap kunjungannya ke Indonesia kali ini bisa makin mempererat hubungan antar kedua negara dan lembaga2 parlemen dan publik. Juga meningkatkan kerjasama, antar negara, parlemen, masyarakat juga umat Islam Rusia maupun Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Di Indonesia, agama yang mayoritas dipeluk warga negara adalah Islam. Dan karena itu demokrasi di Indonesia bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Tokoh-tokoh agama Islam diterima dan bekerjasama dengan baik dengan tokoh-tokoh Bangsa dan tokoh-tokoh agama lainnya."





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Terima Aspirasi DPRD Kabupaten Tabalong, Alifudin: Kami Akan Tindak Lanjuti

KUTIPAN

Jakarta (23/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menerima kembali aspirasi DPRD Kabupaten Tabalong terkait permasalahan yang dihadapi daerah atas Undang-undang no 1 tahun 2022 tentang hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

"Saya juga pernah merasakan bagaimana menjadi wakil rakyat di daerah, karena saya pernah menjadi anggota DPRD Kota Pontianak, maupun DPRD Provinsi Kalimantan Barat, jadi apa yang bapak ibu rasakan juga pernah saya rasakan, setiap audiensi terkadang juga belum mendapatkan jawaban dari pihak yang kita audiensikan" Ucap Alifudin, Ruang Fraksi PKS, Kamis (23/6/2022).

Alifudin pun juga menambahkan, bahwa secara formal, nanti akan dikaji di komisi XI, pada intinya, sebagai perwakilan DPR RI Fraksi PKS,

yang tinggal di Kalimantan, serta aspirasinya juga dari pulau Kalimantan khususnya DPRD Kabupaten Tabalong, dan nanti akan disampaikan kepada kolega anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS.

"Namun juga, kami harapkan adanya keadilan untuk daerah dalam rangka membangun daerah, sehingga tidak ada kesenjangan, jadi Undang-undang no 1 tahun 2022 harus kita kaji bersama dan mungkin yang lebih fasih adalah teman-teman di komisi XI, walaupun saya dulu sebelum menjadi Politisi, berprofesi sebagai BPPK yang juga alumni

STAN Jakarta" Kata Alifudin.

Sebelumnya, Sumiati, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong Fraksi PKS, menyampaikan aspirasinya, bahwa Aspirasi kami terkait Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Kami anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong, datang ke DPR RI untuk memberikan aspirasi melalui bapak Alifudin anggota DPR RI Fraksi PKS, saat ini dengan terbitnya UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jadi sebuah permasalahan di daerah, karena mana banyak sumber pendapatan dari daerah yang akhirnya ditarik kewenangannya diatur oleh pusat, hanya tinggal BPHB yang dikelola daerah," tegas Sumiati, saat memberikan Aspirasi.

Sumiati juga menambahkan, bahwa pada saat kondisi keuangan yang sudah demikian terpuruk

REPUBLIK INDONESIA



H. ALIFUDIN, S.E., M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

secara formal, nanti akan dikaji di komisi XI, pada intinya, sebagai perwakilan DPR RI Fraksi PKS, yang tinggal di Kalimantan, serta aspirasinya juga dari pulau Kalimantan khususnya DPRD Kabupaten Tabalong, dan nanti akan disampaikan kepada kolega anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS.

dengan datangnya UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka akan bertambah berat, tapi disatu sisi, yang diuntungkan adalah daerah perkotaan yang pendapatan

daerahnya dari restoran, jasa dan usaha, tapi jika sumber pendapatan daerahnya berasal dari Sumber Daya Alam itu sangat dirugikan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Presiden PKS: PKS is **Not For Sale** to Oligarch!

KUTIPAN

Jakarta (20/06) — Presiden PKS Ahmad Syaikhul Menegaskan partainya tidak akan dijual kepada Oligarki. Hal itu disampaikan Syaikhul dalam Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PKS di Jakarta, Senin (20/6).

Dalam pidato politiknya, Syaikhul menyampaikan tentang banyak pihak yang menganggap uanglah yang menjadi faktor yang seolah-olah paling menentukan kemenangan. Sehingga oligarki berusaha mendekati dan ingin menguasai partai politik.

“Berkaca pada jati diri dan melihat fenomena perpolitikan hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Apakah tetap mempertahankan jati diri atau dalam jebakan oligarki? JATIDIRI.... Apakah saudara-saudara siap untuk menjaga jati diri PKS? Apakah saudara-saudara siap berjuang untuk meraih kemenangan yang berkah dan bermartabat?” Tanya Syaikhul.

“Siap, merdeka...Allahu

Akbar!”, jawab ratusan peserta Rapimnas dengan penuh semangat.

Mendengar jawaban tersebut, Syaikhul merasa bersyukur. Menurutny, jawaban semacam ini sangat melegakan kader dan simpatisan PKS, bahwa faktor penentu kemenangan tidak semata-mata uang tetapi justru yang paling menentukan adalah hadirnya pertolongan Allah SWT.

“WAMAN NASHRU ILLA MIN INDILLAH. Oleh karena itu saya perlu tegaskan bahwa PKS IS NOT FOR SALE TO OLIGARCH!”

tegas Syaikhul. Kunci melawan politik uang, lanjut Syaikhul, adalah dengan menghidupkan politik pemberdayaan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

“Binalah masyarakat di sekeliling kita dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga ekonomi mereka semakin baik, hidup mereka semakin sejahtera, pendidikan mereka semakin tinggi, kesehatan mereka semakin prima, dan mereka optimis menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik”

Habib Aboe: Rapimnas PKS Momen Satukan Langkah dan Strategi Pemenangan Pemilu 2024

KUTIPAN

Jakarta (20/06) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan laporan kegiatan Rapimnas PKS yang digelar pada 20-21 Juni 2022 di Grand Sahid, Jakarta.

Calon jemaah haji asal Kota Depok terus mempersiapkan diri dengan Manasik Haji tingkat Kota yang diselenggarakan di Masjid Agung Balai Kota Depok. Sebanyak 776 jemaah Kota Depok berangkat tahun ini yang sempat tertunda selama dua tahun akibat mewabahnya pandemi Covid-19.

Pada kesempatan Dalam sambutannya, Habib Aboe mengungkapkan Rapimnas PKS sebagai momen menyatukan gerak langkah untuk kemenangan pemilu 2024 mendatang.

"Rapimnas ini adalah bagian dari upaya penyatuan langkah dan strategi Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Kita harus

memanfaatkan sisa waktu 601 hari ini dengan baik, karenanya perlu ada kesatuan langkah dalam kemenangan," ungkap Aboe dalam sambutannya, Senin (20/6/2022).

Habib Aboe menuturkan, saat ini Partai politik mulai berusaha menarik simpati masyarakat agar lolos ambang batas parlemen.

"Menuju Pemilu 2024, seluruh parpol berlomba untuk menarik hati dan simpati pemilih agar lolos parlementary threshold guna mendapatkan kursi di Senayan. Selain itu, partai partai juga berlomba mengusung calon presiden potensial yang diharapkan mampu memberikan efek ekor jas (coattail effect) bagi parpol

pengusung capres," ucap Aboe.

"Oleh karenanya, hari ini kita melakukan Rapimnas dalam rangka mempersiapkan mesin partai, melakukan evaluasi dan perbaikan yang lebih baik lagi menghadapi event politik nasional yang semakin dinamis," lanjutnya.

Lebih jauh, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI itu menjelaskan Rapimnas juga sebagai bahan evaluasi agenda yang telah dilaksanakan untuk rekomendasi perbaikan agenda menghadapi pemilu mendatang.

"Melalui Rapimnas ini diharapkan akan ada evaluasi atas berbagai program yang telah kita laksanakan, untuk kemudian disusun rekomendasi perbaikan agenda bersama pemenang Pileg dan Pilpres 2024," pungkas Aboe.

Rapimnas PKS yang berlangsung pada 20-21 Juni 2022 dihadiri unsur jajaran pengurus DPP PKS dan Ketua DPW PKS seluruh provinsi se-Indonesia.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Sekjen DPP PKS

"Rapimnas ini adalah bagian dari upaya penyatuan langkah dan strategi Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Kita harus memanfaatkan sisa waktu 601 hari ini dengan baik, karenanya perlu ada kesatuan langkah dalam kemenangan"



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
fraksipksdprri
-  Twitter
@fraksipksdprri
-  Facebook
Fraksi PKS DPR RI
-  Youtube
PKSTV DPR RI

***Nantikan
Setiap Pekan***